

**PENGARUH KINERJA PEGAWAI TERHADAP PENINGKATAN
PENDAPATAN PAJAK DI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JENEPONTO**

Disusun dan diusulkan oleh

GAMISWAR PUTRA OKTAVIANTO
Nomor Stambuk : 10561 04728 13



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2017

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaruh Kinerja Pegawai Terhadap Peningkatan
Pendapatan Pajak di Pendapatan Pengelolaan
Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten
Jeneponto

Nama Mahasiswa : Gamiswar Putra Oktavianto

Nomor Stambuk : 10561 04728 13

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Muhlis Madani, M.Si



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Mengetahui:

Dekan

Ketua Jurusan

Fisipol Unismuh Makassar

Ilmu Administrasi Negara



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si


PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0014/FSP/A.1-VIII/38/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam Program studi Ilmu Administrasi Negara Di Makassar pada hari selasa tanggal 9 bulan januari tahun 2018.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



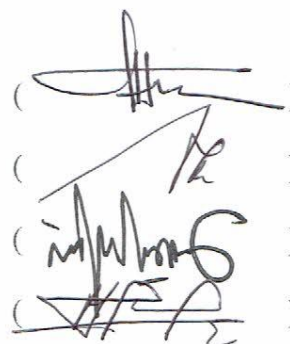
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji:

1. Dr. Jaelan Usman, M.Si (Ketua)
2. Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH, MH
3. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
4. Dra. Hj. Muhajirah Hasanuddin, M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Gamiswar Putra Oktavianto

Nomor Stambuk : 10561 04728 13

Program studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 13 Januari 2018

Yang Menyatakan,

Gamiswar Putra Oktavianto

ABSTRAK

GAMISWAR PUTRA OKTAVIANTO, Pengaruh Kinerja Pegawai Terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak Di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto (dibimbing oleh Muhlis Madani dan Hj. Ihyani Malik).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kinerja pegawai terhadap peningkatan pendapatan pajak di dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten jeneponto. Penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif, data kinerja pegawai dan peningkatan pendapatan pajak dikumpul dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner. Data tersebut dianalisis secara statistik deskriptif kuantitatif dengan menggunakan SPSS versi 20. Populasi di penelitian ini sebanyak 53 dan sampel penelitian sebanyak 53 pegawai .

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pegawai mencapai nilai 79,1% atau berada dalam kategori baik dan sangat dipengaruhi oleh indikator kuantitas dengan nilai indeks tanggapan responden sebanyak 79,74%, peningkatan pendapatan pajak mencapai nilai 78,5% atau berada dalam kategori baik dan sangat dipengaruhi oleh indikator optimalisasi pemungutan pajak dengan nilai indeks tanggapan responden sebanyak 80,37%. Kemudian dari hasil uji hipotesis menunjukkan adanya pengaruh signifikan sebesar 48,6% serta korelasinya ke arah positif sebesar 69,7% antara kinerja pegawai terhadap peningkatan pendapatan pajak di Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto.

Katakunci : *kinerja pegawai, peningkatan pendapatan pajak*

KATA PENGANTAR

“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Dengan memanjatkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kehadiran Allah S.W.T, atas Rahmat dan Taufiq-Nya jualah sehingga penulisan skripsi yang berjudul *“Pengaruh Kinerja Pegawai Terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak di Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto”* dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua terkasih ayahanda **Segani Galib** dan ibunda **Rosmiati** atas segala cinta dan kasih sayang yang telah diberikan serta segenap do'a yang di panjatkan dalam mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh keikhlasan, kepada saudara-saudara penulis **Ginawati Fitry Hartanti** dan **Abdul Galib Nimang** serta seluruh **Keluarga Besar** penulis yang selalu memberi semangat dan dukungan baik moril dan non moril. Selanjutnya pada kesempatan ini penulis tak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen Pembimbing I bapak **Dr. Muhlis Madani M.Si** dan Pembimbing II ibu **Dr. Hj. Ihyani Malik S.Sos, M.Si** yang dengan tulus membimbing penulis, melakukan koreksi dan perbaikan-perbaikan yang amat berharga sejak awal

hingga selesainya skripsi ini. Gagasan-gagasan beliau kenikmatan intelektual yang tak ternilai harganya, teriring do'a semoga ALLAH S.W.T menggolongkan upaya-upaya beliau sebagai amal kebaikan. Penulis juga berterima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Rahman Rahim, MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Kepada Dosen Fisipol, Staf dan Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan di kampus ini.
5. Para Kakanda dan Sahabat penulis Supriyanto, Nuriana, Rusdi, Juhaedi, Abryanto, Muh. Sukri, Andi Renreng, serta seluruh anak-anak Mahasiswa Turatea yang selalu memberikan warna-warni dalam kehidupan penulis.
6. Teman-teman seperjuangan Sospol angkatan 2013 khususnya kelas ADN-4 yang telah banyak memberi saran, dukungan, dan motivasi kepada penulis.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 13 Januari 2018

GamiswarPutraOktavianto

DAFTAR ISI

Judul	Halaman
Halaman Persetujuan.....	ii
Penerimaan TIM.....	iii
Halaman Pernyataan keaslian karya ilmiah	iv
Halaman Abstrak.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Kinerja Pegawai.....	6
B. Konsep Peningkatan Pendapatan pajak.....	11
C. Penelitian Sebelumnya.....	21
D. Kerangka Pikir.....	23
E. Defenisi Operasional Variabel	24
F. Hipotesis.....	25
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	26
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	26
C. Sumber Data	27
D. Populasi dan Sampel	28
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Teknik Analisis Data	30
G. Teknik Pengabsahan Data.....	31
BAB IV HASIL PENELETIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Daerah dan Objek Penelitian	33
B. Visi dan Misi Dinas PPKAD Kabupaten Jeneponto	34
C. Pengujian Persyaratan Statistik.....	35
D. Analisis Data Kineja Pegawai.....	40
E. Analisis data Peningkatan Pendapatan pajak.....	51

F. Pengaruh Kinerja Pegawai Terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak Di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto.....	64
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1	Skor Dalam Penelitian..... 29
Tabel 4.1	Hasil Uji Validalitas Kinerja Pegawai..... 36
Tabel 4.2	Hasil Uji Validalitas Peningkatan Pendapatan Pajak 37
Tabel 4.3	Hasil Realibilitas Kinerja Pegawai..... 38
Tabel 4.4	Hasil Realibilitas Peningkatan Pendapatan Pajak..... 39
Tabel 4.5	Hasil Presentase Tanggapan Responden Perindikator. 40
Tabel 4.6	Pernyataan Melakukan Pekerjaan dengan Akurat (X1) 41
Tabel 4.7	Pernyataan Melakukan Hasil Pekerjaan Yang Bermutu (X2)..... 42
Tabel 4.8	Pernyataan Berusaha Menghasilkan Kualitas Kerja Yang baik (X3)..... 42
Tabel 4.9	Frekuensi Hasil Indikator Kualitas..... 43
Tabel 4.10	Pernyataan Melaksanakan Beban kerja Tanpa Harus Dibantu Pegawai Lain (X4)..... 44
Tabel 4.11	Pernyataan Menangani Bebas Kerja Sebagaimana Ditugaskan Oleh Atasan (X5)..... 44
Tabel 4.12	Pernyataan Hasil Pekerjaan Lebih Baik Dibandingkan Waktu Yang Lalu (X6)..... 45
Tabel 4.13	Frekuensi Hasil Indikator Kuantitas..... 46
Tabel 4.14	Pernyataan Datang dan Pulang Kerja Sesuai Dengan Waktu Yang Ditentukan Instansi (X7)..... 46
Tabel 4.15	Pernyataan Menyelesaikan Pekerjaan sesuai Dengan Waktu Yang ditentukan (X8)..... 47
Tabel 4.16	Pernyataan Dalam Pelaksanaan Kerja selalu memperhatikan Prosedur (X9)..... 48
Tabel 4.17	Frekuensi Hasil Indikator Ketetapan Waktu..... 49

Tabel 4.18	Indeks Indikator Kinerja Pegawai.....	49
Tabel 4.19	Hasil Presentase Tanggapan Responden Perindikator.	52
Tabel 4.20	Pernyataan Melakukan Identifikasi pembayar Pajak Baru/Potensial (Y1).....	52
Tabel 4.21	Pernyataan Memperbaiki Basis Data Objek Pajak (Y2).....	53
Tabel 4.22	Pernyataan Memperbaiki Kapasitas dari Setiap Pungutan Pajak (Y3).....	54
Tabel 4.23	Frekuensi Hasil Indikator optimalisasi Objek Pajak..	55
Tabel 4.24	Pernyataan Mengubah tarif Pembayaran Pajak (Y4)..	55
Tabel 4.25	Pernyataan Adanya Penerapan Sanksi Kepada Penunggak Pajak (Y5).....	56
Tabel 4.26	Pernyataan Meningkatkan efesiensi Pemungutan Dari Semua Jenis Pajak (Y6).....	57
Tabel 4.27	Frekuensi Hasil Indikator Optimalisasi Pemungutan Pajak.....	58
Tabel 4.28	Pernyataan Adanya Penyederhanaan Administrasi Pajak (Y7).....	58
Tabel 4.29	Pernyataan Meningkatkan Kordinasi dengan Instansi Terkait (Y8).....	59
Tabel 4.30	Pernyataan Adanya Sosialisasi Kepada Masyarakat Melalui Kampanye Sadar Pembayaran Pajak (Y9).....	60
Tabel 4.31	Frekuensi Hasil Indikator Optimalisasi Penerimaan Dari Wajib Pajak Yang Terdaftar.....	61
Tabel 4.32	Indesk Indikator Peningkatan Pendapatan Pajak.....	62
Tabel 4.33	Data Skor Total Item Kuesioner.....	64
Tabel 4.34	Analisis Deskriptif.....	65
Tabel 4.35	Koefesien Determinan.....	66
Tabel 4.36	Regresi Linear Sederhana.....	67

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir.....	24
Gambar 4.1 Kontinum Interpretasi Skor Kinerja Pegawai.....	51
Gambar 4.2 Kontinum Interpretasi Skor Peningkatan Pendapatan Pajak.....	63
Gambar 4.3 Garis Regresi.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kinerja atau prestasi kerja merupakan hasil yang terukur dicapai oleh individu atau organisasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Pengukuran kinerja merupakan suatu kegiatan yang penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi (pegawai) dalam mencapai misinya. Untuk organisasi pelayanan publik informasi mengenai organisasi lainnya tentu sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang telah diberikan organisasi pemerintah itu memenuhi harapan dan memuaskan pengguna jasa. Dengan melakukan penilaian suatu kinerja maka upaya untuk memperbaiki kinerja bisa dilakukan lebih terarah dan sistematis.

Kinerja dalam suatu organisasi senantiasa diupayakan peningkatannya kinerja tidak saja akan membawa pengaruh langsung kepada organisasi, namun akan berdampak terhadap peningkatan kemampuan pegawai. Selain itu kinerja yang meningkat akan menciptakan suasana yang lebih kondusif yang pada akhirnya menimbulkan persaingan yang sehat antar pegawai yang berdampak pada pengembangan diri pegawai masing-masing. Dengan kata lain apabila kinerja dapat diwujudkan, akan mendukung tercapainya tujuan secara efektif dan efisien yang pada akhirnya menciptakan percepatan, kecepatan, efektivitas dan efisiensi kerja dilingkungan organisasi yang bersangkutan (Mahsun, 2013: 25).

Sejalan dengan itu kedudukan pegawai sangat penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya tugas dari penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan dalam rangka tercapainya tujuan nasional. Pegawai dalam hal ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata.

Pegawai merupakan motor penggerak kelangsungan hidup suatu organisasi. Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya sangat tergantung pada kemampuan, kualitas, kuantitas dan ketetapan waktu dalam organisasi. Dalam rangka mengantisipasi persaingan yang semakin ketat, khususnya dalam menghadapi era perdagangan bebas, diperlukan suatu program pengembangan pegawai sesuai dengan tingkat dinamika dan tuntutan kebutuhan bagi pelaksana tugas-tugas organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kemampuan pegawai harus menjadi prioritas utama agar pegawai dapat memiliki kinerja yang tinggi. (Dwiyanto, 2006: 68).

Hal tersebut tercantum dalam modul sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAN-BPKP,2003) yang menjelaskan bahwa indikator pengukuran kinerja organisasi yaitu indikator masukan, indikator proses, indikator keluaran, indikator hasil, indikator manfaat dan indikator dampak.

Pada dasarnya kinerja yang baik adalah kinerja mengikuti tata cara atau prosedur sesuai standar yang telah ditetapkan organisasi. Kinerja pegawai yang baik secara langsung akan mempengaruhi kinerja lembaga.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Jenepono, maka upaya pelaksanaan tugasnya berdasarkan pada mekanisme dan prosedur yang digariskan organisasi

yaitu menjadi pengelola pendapatan keuangan dan aset daerah yang di percaya akuntabel, profesional, dan melayani dengan baik untuk mewujudkan pemerintahan yang baik sebagai misi utama dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten jeponto. Akan tetapi dalam kenyataannya jumlah pegawai di bidang pendapatan pajak secara kualitas cukup baik, tapi kebanyakan dari pegawai kurang *capabilitas* (kemampuan) dalam menyelesaikan tugasnya, dan kurangnya kemampuan pegawai untuk lebih berkreasi dan berinovasi dalam mengintensifkan pemungutan pajak daerah kabupaten jeponto, semua itu tak lepas dari kurang kinerja pegawai dalam pengelolaan pendapatan pajak daerah terkhusus di dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten jeponto yang mempunyai tugas pokok untuk mengelola penghasilan asli daerah (PAD) salah satunya berasal dari pendapatan pajak yang merupakan penghasilan terbesar pemerintah daerah. Oleh karena itu, para aparatur yang bertugas di kantor dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten jeponto harus memiliki keterampilan teknis yang memadai serta mampu meningkatkan kualitas kerja dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Disisi lain, menurut Samsul Alam (Skripsi, 2010:4), mengemukakan dalam hasil penelitiannya bahwa kinerja di instansi pemerintah daerah, masih kurang baik dalam hal pelaksanaan tugasnya terkhusus dalam pendapatan pajak daerah. Terkadang kinerja pegawai belum optimal dalam pelaksanaan tugasnya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), dikarenakan masih kurangnya kemampuan personil (pegawai), kurangnya intensif pelaksanaan pemungutan pajak, dan tidak memperhatikan kualitas kinerja pegawai sehingga tidak sesuai

dengan apa yang di targetkan sebelumnya. Suatu Instansi seharusnya menghasilkan kualitas dalam pelaksanaan pekerjaan karena instansi pemerintahan memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan daerah. Berhasil atau tidaknya suatu daerah sangat bergantung pada prestasi kerja atau kinerja pegawai di instansi pemerintahan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh kinerja pegawai terhadap peningkatan pendapatan pajak daerah di Kabupaten Jeneponto.

Penelitian dan analisis ini dikembangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: “Pengaruh Kinerja Pegawai Terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dikemukakan bahwa keberhasilan suatu instansi pemerintahan daerah sangat ditentukan dari hasil kinerja pegawainya, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu :

Adakah pengaruh kinerja pegawai terhadap peningkatan pendapatan pajak di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Jeneponto?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penulisan skripsi ini memiliki tujuan pokok yang menjadi target utama yaitu:

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kinerja pegawai terhadap peningkatan pendapatan pajak di dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten jeneponto?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian diatas yang mempunyai dua dimensi utama yaitu:

1. Manfaat Teoritis adalah Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada perkembangan ilmu administrasi dan manajemen terutama teori dan konsep manajemen kinerja dalam peningkatan pendapatan pajak daerah.
2. Manfaat Praktis adalah Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya-upaya peningkatan prestasi kerja (kinerja) terutama dalam upaya peningkatan pendapatan pajak daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kinerja

Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja perusahaan adalah tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan. Manajemen kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di perusahaan tersebut. Kinerja individu, kinerja kelompok, dan kinerja perusahaan dipengaruhi oleh banyak faktor intern dan ekstern organisasi (Kasmir,2016:181).

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi (Mahsun, 2013:27)

Rivai (2004:309),mengemukakan bahwa Kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan atau dengan kata lain kinerja karyawan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya perusahaan untuk mencapai tujuannya.

Menurut Colquitt (2011:183), mengatakan kinerja adalah nilai dari seperangkat perilaku karyawan yang berkontribusi, baik secara positif maupun secara negatif terhadap pemenuhan tujuan organisasi. Selain itu kinerja juga menurut Colquitt di tentukan oleh tiga faktor, yaitu:(1). Kinerja tugas

(*taskperformance*), (2). perilaku kesetiaan sebagai kontribusi perilaku positif, (3). Perilaku produktif tandingan sebagai kontribusi perilaku negatif.

Mangkunegara (2000:67), menjelaskan: istilah kinerja bersal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang telah dicapai oleh seseorang). Pengertian kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Menurut Ivancevich (2012:184), Kinerja adalah hasil yang di capai dari apa yang diinginkan oleh organisasi. Kinerja (*job performance*) juga merupakan fungsi dari:

1. Kapasitas untuk melakukan, yang berkaitan dengan derajat hubungan proses dalam individu yang relevan antara tugas dengan keahlian, pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman.
2. Kesempatan melakukan yang berkaitan dengan ketersediaan peralatan dan teknologi, dan
3. Kerelaan untuk melakukan berhubungan dengan hasrat dan kerelaan untuk menggunakan usaha mencapai kinerja.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja sumber daya manusia adalah prestasi kerja atau hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai sumber daya manusia per satuan periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Tujuan evaluasi kinerja adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja dari sumber daya manusia

organisasi. Secara lebih spesifik, tujuan dari evaluasi kinerja sebagaimana dikemukakan Agus Sanyoto dalam Mangkunegara (2005:67) adalah :

1. Meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan kinerja.
2. Mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan, sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, atau sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu.
3. Memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karier atau terhadap pekerjaan yang diembannya sekarang.
4. Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan, sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya.
5. Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan, khusus rencana diklat, dan kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hal yang perlu diubah.

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja baik secara langsung maupun tidak langsung (Kasmir, 2016:195), yaitu:

1. Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan perusahaan terhadap karyawannya. Kinerja yang baik tentu saja akan mendapatkan balas jasa yang baik pula seperti kenaikan gaji dan tunjangan lainnya.
2. Jenjang karier merupakan penghargaan yang diberikan perusahaan kepada pegawai atau karyawan. Pegawai yang memiliki prestasi atau kinerja yang

baik tentu akan diberikan peningkatan karier. Kenaikan karier dapat berupa pengangkatan.

3. Citra karyawan merupakan pandangan terhadap seseorang atau pegawai, karena telah melakukan sesuatu.

C. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja adalah salah satu tugas penting untuk dilakukan oleh seorang manajer atau pimpinan. Walaupun demikian, pelaksanaan kinerja yang objektif bukanlah tugas yang sederhana. Penilaian harus dihindarkan adanya "*like dan dislike*", dari penilai, agar objektivitas penilai dapat terjaga. Kegiatan penilaian ini adalah penting, karena dapat digunakan untuk memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada pegawai tentang kinerja pegawai tersebut. ada lima faktor dalam penilaian kinerja yang populer (Kasmir,2016:208), yaitu :

1. Kualitas (mutu), yaitu pengukuran kinerja dapat dilihat dengan kualitas (mutu) dari pekerjaan yang dihasilkan melalui suatu proses tertentu.
2. Kuantitas (jumlah) yaitu, untuk mengukur kinerja dapat pula dilakukan dengan melihat dari kuantitas (jumlah) yang dihasilkan seseorang.
3. Ketetapan waktu yaitu untuk jenis pekerjaan tertentu di berikan batas tertentu dalam menyelesaikan pekerjaannya.
4. Penekanan biaya adalah biaya yang dikeluarkan untuk setiap aktivitas perusahaan sudah dianggarkan sebelum aktivitas di jalankan.
5. Pengawasan adalah hampir seluruh jenis pekerjaan melakukan dan memerlukan pengawasan terhadap pekerjaan yang sedang berjalan.

6. Hubungan antar karyawan, yaitu kinerja seringkali di kaitkan dengan kerukunan antar karyawan dan antar pimpinan.

Wibowo (2012:235), mengatakan bahwa banyak faktor yang dapat dijadikan ukuran kinerja, namun ukuran kinerja harus relevan, signifikan, dan komprehensif. Adapun klasifikasi ukuran kinerja adalah sebagai berikut:

1. Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai. Pengukuran kuantitatif melibatkan perhitungan keluaran dari proses atau pelaksanaan kegiatan. Ini berkaitan dengan jumlah keluaran yang dihasilkan.
2. Kualitas, adalah mutu yang dihasilkan. Pengukuran kualitatif keluaran mencerminkan pengukuran tingkat “kepuasan“, yakni seberapa baik penyelesaiannya.
3. Ketepatan waktu, adalah sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan. Pengukuran ketepatan waktu merupakan jenis khusus.
4. Tanggung jawab, yaitu setiap pekerjaan yang telah dikerjakan mampu di pertanggung jawabkan.

Penilaian kinerja dapat menjadi sumber informasi utama dan umpan balik untuk pegawai, yang merupakan kunci pengembangan bagi pegawai di masa mendatang. Di saat atasan mengidentifikasi kelemahan, potensi dan kebutuhan pelatihan melalui umpan balik penilaian kinerja, mereka dapat memberitahukan pegawai mengenai kemajuan pegawai tersebut, mendiskusikan keterampilan apa yang perlu mereka kembangkan dan melaksanakan perencanaan pengembangan.

D. Konsep peningkatan pajak

Peningkatan pendapatan pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek dan subjek yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak.

Menurut Abu bakar dan Halim (2001:147), intensifikasi pajak diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten untuk meningkatkan penerimaan pajak yang biasa diaplikasikan dalam bentuk:

1. Perubahan tarif pajak
2. Peningkatan pengelolaan pajak

Fungsi dari kegiatan peningkatan pajak daerah adalah sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Kegiatan ini berfungsi untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah yaitu meningkatkan kinerja aparatur pengelola pungutan maupun penerapan aspek teknik pungutan pajak secara profesional. Kebijakan dan usaha intensifikasi adalah berupa peningkatan pendapatan asli daerah dari sumber-sumber yang telah ada atau berjalan selama ini.

E. Upaya kegiatan peningkatan pajak

Dalam upaya pelaksanaan peningkatan pendapatan pajak dikemukakan oleh Soemitro (2008 : 31), untuk meningkatkan penerimaan pajak negara, diantaranya:

1. Perluasan wajib pajak
2. Optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek atau subjek yang telah tercatat atau terdaftar

3. Penyempurnaan tarif pajak, dan
4. Penyempurnaan administrasi pemungutan pajak

Upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut Sitorus (2008 : 34) :

1. **Memperluas basis penerimaan.** Tindakan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan;
2. **Memperkuat proses pemungutan.** Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM;
3. **Meningkatkan pengawasan,** antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.
4. **Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan,** antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui

pnyszerhanaan administrasi pajak, meningkatkan efsiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan;

5. **Meningkatkan kapasitas penerimaan** melalui perencanaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan intansi terkait di daerah.

Upaya intensifikasi akan mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, aspek personalia, yang pelaksanaannya melalui kegiatan sebagai berikut (Kurtiawan, 2005:44) :

1. Menyusuaikan/ memperbaiki aspek kelembagaan organisasi pengelolaan peendapatan asli daerah, berikut perangkatnya sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang, yaitu dengan cara menerapkan secara optimal sistem dan prosedur administrasi pajak daerah. Dengan berlakunya sistem dan prosedur tersebut, tidak lagi berorientasi pada sektor atau bidang pungutan tapi berorientasi pada bidang fungsi-fungsi dalam organisasinya yaitu, fungsi pendaftaran dan pendataan, fungsi penetapan, fungsi pembukuan dan pelaporan, fungsi penagihan serta perencanaan dan penagihan operasional.
2. Memberikan dampak ke arah peningkatan pendapatan asli daerah karena sistem ini dapat menciptakan :
 - a. Peningkatan jumlah wajib pajak
 - b. Peningkatan cara-cara penepatan pajak
 - c. Peningkatan pemungutan pajak dalam jumlah yang benar dan tepat pada waktunya

- d. Peningkatan sistem pembukuan, sehingga memudahkan dalam hal pencarian data tunggakan pajak yang akhirnya mempermudah penagihan.
3. Memperbaiki/ menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional yang meliputi :
 - a. Penyesuaian/penyempurnaan administrasi pemungutan pajak
 - b. Penyesuaian tarif
 - c. Pengawasan dan pengendalian penatausahaan
 4. Peningkatan pengawasan dan pengendalian yang meliputi :
 - a. Pengawasan dan pengendalian yuridis
 - b. Pengawasan dan pengendalian teknis
 - c. Pengawasan dan pengendalian penatausahaan
 5. Peningkatan sumber daya manusia pengelolaan PAD, meningkatkan mutu(kualitas) sumber daya manusia/aparatur pengelolaan pendapatan daerah dapat dilakukan dengan mengikutsertakan aparatnya dalam kursus keuangan daerah (KKD), juga program-program pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
 6. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak.

Seiring dengan itu, menurut Soemitro (2006:77), sistem intensifikasi pajak maksudnya untuk meningkatkan pajak dengan mengintensifikasi segi-segi :

1. Intensifikasi perundang-undangannya
2. Meningkatkan kepastian hukum

3. Mengintensifkan peraturan pelaksanaan
4. Meningkatkan mutu aparatur perpajakan
5. Meningkatkan fungsi dan menyesuaikan organ/struktur perpajakan sehingga sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi
6. Memberantas pemalsuan pajak
7. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pematuhan peraturan perpajakan dan meningkatkan pengawasan melekat.

F. Konsep Perpajakan

Reformasi perpajakan yang pertama kali dilakukan di Indonesia telah berlangsung lebih dari 25 tahun, namun yang pertama kalinya, yaitu dalam perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak didefinisikan secara tertulis dalam undang-undang perpajakan. Suatu hal yang baru ini justru menjadi antiklimaks karena secara esensi menunjukkan bahwa pemahaman *policy maker* tentang pajak masih dalam paradigma yang lama.

Dalam pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 28 perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (selanjutnya disebut dengan UU KUP 2007), pajak didefinisikan sebagai ; pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan . Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan yang salah satu sumber dananya berasal dari dalam negeri yaitu sektor pajak. Beberapa ahli mendefenisikan pajak sebagai berikut :

Menurut Mardiasmo (2011:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidakmendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yangdigunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Soemitro (2006:1) guru besar dalam Hukum Pajak pada Universitas Padjajaran, Bandung, seperti dikutip oleh SafriNurmantu, yaitu: "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihankekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi),yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaranumum.

Dari beberapa pengertian diatas , dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

1. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada kas Negara yang berupa uang (bukan barang)
2. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya .
3. Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh Pemerintah

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara , yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas .

Pajak sebagai sumber pendapatan utama pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang bermanfaat bagi masyarakatnya

G. Sistem pemungutan pajak.

Sistem pemungutan pajak menurut Madiasmo (2011:7), yaitu terdiri dari:

1. *Official assessment system*, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
2. *Self assessment system*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
3. *With Holding System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

H. Asas-Asas pemungutan pajak

Menurut Waluyo (2008:13), menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya di dasarkan pada asa-asis sebagai berikut :

1. *Equality* adalah pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, maksudnya pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang di terima.

2. *Certainty* adalah penetapan pajak itu tidak ditentukan secara sewenang-wenang.
3. *Convenience* adalah kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.
4. *Economy* adalah secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak di harapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

I. Fungsi Pajak

Fungsi pajak berarti kegunaan atau manfaat dari pajak itu sendiri .

Umumnya terdapat 2 fungsi pajak Mardiasmo (2011:1) , yaitu :

1. Fungsi Penerimaan

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah . Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBD sebagai penerimaan pendapatan asli daerah.

2. Fungsi Mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang social dan ekonomi . Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dan barang mewah dapat ditekan.

J. Jenis Pajak

Sesuai dengan asas pemungutan pajak , maka di Indonesia ditetapkan berbagai pengelompokan pajak agar dapat membedakan antara pajak

yang satu dengan pajak yang lain. Menurut Mardiasmo (2011:5), Jenis pajak dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu :

1. Menurut Golongannya :

a. Pajak Langsung (Direct taxes)

Adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain .

b. Pajak Tidak Langsung (Indirect taxes)

Adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain .

2. Menurut Sifatnya :

a. Pajak Subjektif

Adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya , dalam arti memperhatikan keadaan wajib pajak, yaitu untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang objektif yang berhubungan erat dengan materialnya, yaitu disebut dengan *ability to-pay*-nya.

b. Pajak Objektif

Adalah pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak .

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

a. Pajak Pusat

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

b. Pajak Daerah

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Menurut Ismail (2005:73), mengatakan bahwa Perbedaan pajak pusat dan pajak daerah umumnya dilakukan untuk menentukan kewenangan pemungutan pajak dan pemanfaatan/penggunaannya serta untuk menghindari adanya pajak berganda. umumnya pajak yang sudah dipungut oleh pusat, tidak lagi dipungut oleh pemerintah daerah, begitu juga sebaliknya. Secara teori dan praktiknya pemerintah daerah dapat memperoleh pendapatan pajak melalui tiga cara yaitu *tax sharing*, *surcharge*, dan memungut sendiri.

Pajak daerah pada dasarnya merupakan sumber penerimaan daerah yang utama dalam membiayai semua keperluan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban pelayanan pemerintah daerah kepada rakyatnya. Tjip menyitir William dan Morse (2005:84), menyatakan bahwa sumber pendapatan memiliki tiga karakteristik, yaitu:

1. Pungutan merupakan kewajiban
2. Dipungut pemerintah, dan
3. Diperuntukkan sebagai tujuan publik.

Menurut Tjip (2005:85), untuk menilai apakah pajak daerah yang sudah ada baik, ada 5 (lima) tolak ukur atau indikator yang dapat digunakan, yaitu:

1. Hasil, memadai tidaknya suatu pajak daerah dalam kaitan berbagai layanan yang dibiayainya.
2. Keadilan, tidak adanya perbedaan-perbedaan dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari suatu daerah.

3. Daya guna ekonomi, penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi daerah
4. Pelaksanaan, suatu pajak haruslah terlaksana dengan baik
5. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah, pajak daerah tidak menimbulkan beban pajak yang lebih besar dari kemampuan tata usaha daerah.

K. Penelitian Sebelumnya

Adapun yang menjadi acuan penulis dalam melakukan penulisan skripsi adalah dengan memilih dari penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Elvira Tjandinegara (skripsi:2010) dengan judul : *Pengaruh Faktor-faktor Disiplin Kerja terhadap Produktivitas Kinerja Karyawan pada CV. Gajaco Utama di KotaMakassar*. Hasil analisis pengaruh antara faktor disiplin kerja (kualitas ,kuantitas, ketepatan waktu, penekanan biaya,dan kerjasama) dengan produktivitas kinerja karyawan, maka dapat dikatakan ada pengaruh yang signifikan antara disiplin kerja dengan produktivitas kinerja karyawan. Hasil analisis regresi, nampak bahwa faktor yang dominan mempengaruhi produktivitas kinerja adalah ketepatan waktu, alasannya karena nilai koefisien standardized ketepatan waktu memiliki nilai yang tertinggi jika dibandingkan dengan variabel kualitas, taat pada peraturan, penekanan biaya, dan kerjasama. Dengan analisis penelitian sebelumnya seperti yang di uraikan di atas, telah mengidentifikasi bahwa masalah yang terdapat dalam instansi pemerintahan khususnya pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten jeneponto bahwa

ketetapan waktu sangat menunjang keberhasilan kinerja pegawai untuk mencapai tujuan peningkatan pendapatan pajak daerah.

Penelitian kedua adalah dilakukan oleh Nafilah (skripsi,2013), dengan judul: *Intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan di dinas pendapatan daerah kota makassar*. Dari hasil analisis pengaruh intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan, sudah nampak bahwa faktor yang berpengaruh dalam peningkatan pendapatan asli daerah adalah dengan optimalisasi pemungutan pajak karena dengan mengoptimalkan pemungutan pajak maka dengan kata lain penerimaan dari wajib pajak juga akan semakin meningkat. Maka dengan analisis sebelumnya seperti yang diuraikan di atas, maka telah mengidentifikasi bahwa masalah yg terjadi di dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten jenepono bahwa dengan cara optimalisasi pemungutan pajak sangatlah menunjang keberhasilan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu para personil(pegawai) harus lebih fokus dalam mengoptimalkan pemungutan pajak guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penelitian ketiga adalah dilakukan oleh Samsul Alam (Skripsi,2010), dengan judul: *Kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pinrang*. Dalam hasil penelitiannya bahwa kinerja di instansi pemerintah daerah, masih kurang baik dalam hal pelaksanaan tugasnya terkhusus dalam pendapatan pajak daerah. Terkadang kinerja pegawai belum optimal dalam pelaksanaan tugasnya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), dikarenakan masih kurangnya kemampuan personil (pegawai), kurangnya intensif pelaksanaan pemungutan pajak, dan tidak memperhatikan kualitas kinerja

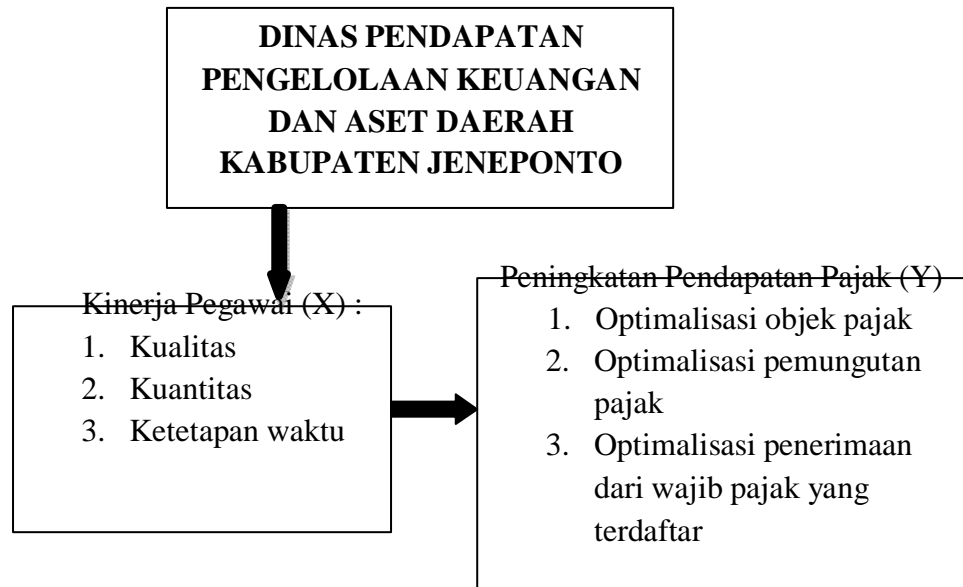
pegawai sehingga tidak sesuai dengan apa yang di targetkan sebelumnya. Suatu Instansi seharusnya menghasilkan kualitas dalam pelaksanaan pekerjaan karena instansi pemerintahan memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan daerah. Berhasil atau tidaknya suatu daerah sangat bergantung pada prestasi kerja atau kinerja pegawai di instansi pemerintahan.

L. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, antara lain sebagai berikut:

1. Variabel bebas adalah variabel yang menyebabkan atau mempengaruhi yaitu faktor-faktor yang di ukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungan antara fenomena yang di observasi atau diamati. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah kinerja pegawai (X), dimana memiliki 3 indikator menurut (Kasmir, 2016 : 208) yaitu kualitas, kuantitas dan Ketetapan waktu.
2. Variabel terikat adalah faktor-faktor yang diobservasi dan diukur untuk menentukan adanya pengaruh variabel bebas yaitu faktor yang muncul atau berubah sesuai dengan yang diperkenalkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah peningkatan pendapatan pajak (Y), dimana memiliki 3 indikator menurut (Sitorus, 2008 : 34) yaitu: optimalisasi objek pajak, optimalisasi pemungutan pajak, dan optimalisasi penerimaan dari wajib pajak yang terdaftar.

Kerangka berpikir yang dikemukakan dalam pembahasan diatas, dapat dikemukakan dalam bentuk skema di bawah ini:



Gambar 2.1

M. Definisi operasional

Adapun definisi variabel yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

1. Kinerja pegawai

Kinerja pegawai adalah prestasi kerja yang dihasilkan oleh pegawai sesuai dengan perannya. Indikatornya adalah :

- a. Kualitas adalah hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan sebagai tanggung jawab sesuai dengan perannya.
- b. Kuantitas adalah jumlah pekerjaan yang telah dilaksanakan sebagai tanggung jawab yang di berikan kepadanya.
- c. Ketetapan waktu adalah batasan yang diberikan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah di tentukan.

2. Peningkatan Pendapatan Pajak

Peningkatan pendapatan pajak daerah adalah upaya perubahan atau memperbaiki hasil pendapatan pajak daerah secara efektif sehingga pendapatan asli daerah akan lebih meningkat dari hasil sebelumnya. Indikator adalah :

- a. Optimalisasi objek pajak adalah melakukan identifikasi pembayar pajak baru atau potensial.
- b. Optimalisasi pemungutan pajak adalah meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pajak.
- c. Optimalisasi penerimaan dari wajib pajak yang terdaftar yaitu Adanya sosialisasi kepada masyarakat melalui kampanye sadar akan pembayaran pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan dari wajib pajak.

N. Hipotesis

Penelitian ini penulis menggunakan hipotesis yaitu suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang pengaruh antara variabel yaitu sebagai berikut :

Diduga ada pengaruh yang signifikan antara kinerja pegawai terhadap peningkatan pendapatan pajak di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jenepono. Dengan arah positif sebesar 48,6 persen dan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi penelitian

Adapun waktu yang dilakukan dalam meneliti adalah selama kurang lebih dua bulan yaitu 18 Maret - 21 Mei 2017 di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jenepono.

Lokasi dalam penelitian ini adalah Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Jenepono, dalam penentuan lokasi penelitian ini memiliki dasar pertimbangan yaitu dalam penelitian ini diarahkan untuk menganalisis beberapa permasalahan yang ada di kabupaten jenepono khususnya pengaruh kinerja pegawai terhadap peningkatan pendapatan pajak daerah kabupaten jenepono, oleh karena itu peneliti memilih lokasi penelitian di kantor dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten jenepono karena instansi tersebut memiliki tugas utama untuk mengelola pendapatan pajak daerah yang sangat berkaitan dengan aspek-aspek yang ingin dianalisis dalam penelitian ini yaitu pengaruh kinerja pegawai terhadap peningkatan pendapatan pajak daerah kabupaten jenepono.

B. Jenis dan Tipe penelitian

1. Dalam penelitian ini memiliki Jenis Penelitian kuantitatif yaitu suatu jenis penelitian yang mengukur data dengan suatu alat ukur tertentu yang diperlukan untuk keperluan analisis secara kuantitatif yang berbentuk angka-angka (Sugiyono, 2012 : 8).

2. Tipe Penelitian survei adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang di ajukan pada responden dalam berbentuk sampel dari sebuah populasi (Sugiyono, 2007:7).

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini data-data yang dapat diambil dapat di golongan menjadi dua bagian yaitu: data sekunder dan data primer.

1. .Data primer adalah sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari sumber pertama (responden) dengan menggunakan kuesioner.
2. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten jeneponto seperti data daftar nama-nama pegawai, struktur organisasi instansi, dan tupoksi masing-masing pegawai, serta diperoleh dari sumber-sumber lain seperti website dan hasil penelitian terdahulu maupun kajian teoritis yang diperlukan dalam penelitian ini.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012:90). Dalam penelitian ini yang merupakan populasi adalah seluruh pegawai di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto yaitu 53 pegawai yang terdiri dari laki-laki sebanyak 41 orang dan perempuan 12 orang, dan kisaran usia yang paling dominan adalah antara (41-50 tahun) yaitu 21 orang, jika di lihat dari segi pendidikan yang paling dominan adalah yang berpendidikan SMA sebanyak 20 orang, serta berdasarkan golongannya yaitu golongan I sebanyak 4 orang, golongan II sebanyak 14 orang, golongan III sebanyak 32 orang, dan golongan IV sebanyak 3 orang.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2012 : 91), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *total sampling* atau *sampling jenuh* yaitu sampel yang mewakili seluruh populasi. Alasan mengambil *total sampling* karena jumlah populasi yang kurang dari 100 seluruh populasi dijadikan sampel penelitian semuanya (sugiyono, 2007:57). Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah semua populasi menjadi sampel yaitu pegawai di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto yang berjumlah 53 orang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Menggunakan Angket atau kuesioner yang mengurutkan daftar pertanyaan yang didasarkan pada teori-teori dan literatur-literatur yang berkaitan dengan Kinerja Pegawai dan Peningkatan pendapatan pajak Daerah kabupaten jeneponto. Kuesioner berisi pertanyaan mengenai Kinerja pegawai dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten jeneponto. Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner terhadap responden yang telah ditetapkan yaitu semua pegawai di kantor dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten jeneponto dengan cara mendatangi langsung responden.

Dengan kuesioner terdiri dari tiga bagian, yaitu tata cara pengisian kuesioner, pertanyaan yang berkaitan dengan identitas reponden, dan pertanyaan yang berkaitan dengan jawaban seberapa jauh responden setuju atau tidak setuju terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner. Dengan cara ini diharapkan *respon rate* akan tinggi, sehingga akan memenuhi asumsi *central limit theorem*. Pemberian skor dengan menggunakan lima *skala likert* adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skor dalam Penelitian

Simbol	Kategori	Nilai
STS	Sangat Tidak Setuju	1
TS	Tidak Setuju	2
N	Netral	3
S	Setuju	4
SS	Sangat Setuju	5

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis ini hanya berupa akumulasi data dasar dalam bentuk deskripsi semata dalam arti tidak mencari atau menerangkan saling hubungan, menguji hipotesis, membuat ramalan, atau melakukan penarikan kesimpulan. (Sugiyono, 2013:29)
2. Analisis kuantitatif, adapun data yang diperoleh dari pendekatan empiris yaitu hasil data kuesioner dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan teknik pengujian uji *simple regression* (regresi sederhana) yang di hitung dengan menggunakan perangkat lunak (softwer) atau *SPSS for 20* berupa paket program komputer. Analisis regresi linier sederhana dipergunakan karena variabel yang dicari diperoleh oleh hanya satu variabel bebas dengan variabel penjelas. Regresi linier sederhana menggunakan model persamaan (sugiyono, 2013:261).

Model regresi linearnya adalah :

$$Y = a + b (X)$$

Dimana :

Y = Peningkatan Pendapatan Pajak

X = Kinerja Pegawai

a dan b = Koefisien regresi

G. Uji Pengabsahan/Kualitas Data

1. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan alat pengukuran konstruk atau variable. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2001:47).

Uji Realibilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukur dalam mengukur suatu gejala/kejadian. Semakin tinggi reliabilitas suatu alat pengukur, semakin stabil pula alat pengukur tersebut. Dalam melakukan perhitungan *Alpa*, digunakan alat bantu program komputer yaitu *SPSS for 20* dengan menggunakan model *CronbachAlpa*. Sedangkan dalam pengambilan keputusan reliabilitas, suatu instrument dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpa* $\geq 0,5$ dan sebaliknya (Ghozali, 2001) :

- a. Jika alpha 0,5 – 0,7 maka item dikatakan reliabel
- b. Jika alpha $< 0,5$ maka item tidak reliabel atau rendah

2.Uji Validitas

Untuk mengetahui tingkat kesahihan atau kevalidan dari suatu instrumen,maka dilakukan pengujian validitas instrumen terlebih dahulu. Menurut Ghozali (2001:42) uji validitas adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukuroleh kuesioner.

Dalam melakukan pengujian validitas, digunakan alat ukur berupa program komputer yaitu *SPSS for 20*, dan jika suatu alat ukur mempunyai korelasi

yang signifikan antar skor item terhadap skor totalnya maka dikatakan alat skor tersebut adalah valid (Ghozali, 2001:42). Pengambilan keputusannya bahwa setiap indikator valid apabila nilai r hitung lebih besar atau sama dengan r tabel. Untuk menentukan nilai r hitung, dibantu dengan program *SPSS for 20* yang dinyatakan dengan nilai *Corrected Item Total Correlation*. Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

- a. Jika r hitung $>$ r tabel, maka data valid
- b. Jika r hitung $<$ r tabel, maka data tidak valid

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Daerah dan Objek Penelitian

Kabupaten Jeneponto terletak di ujung bagian barat dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang secara geografis terletak di antara $5^{\circ}23'12''$ - $5^{\circ}42'1,2$ Lintang Selatan (LS) dan antara $119^{\circ}29'12$ - $119^{\circ}56'44,9$ Bujur Timur (BT). Kabupaten Jeneponto memiliki beberapa sungai (hidrologi) yang sebagian telah dibendung yaitu kelara, Tino, Poko Bulu yang telah berfungsi untuk mengairi sebagian lahan persawahan. Daerah bagian selatan memiliki perairan laut (*Flores Sea*) dengan panjang pantai sekitar 114 km.

Batas-batas daerah Kabupaten Jeneponto yaitu :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Takalar.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores.
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Takalar.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng.

Secara administrasi pemerintahan, Kabupaten Jeneponto terdiri atas 11 (sebelas) kecamatan, masing-masing Kecamatan Bangkala, Bangkala Barat, Tamalatea, Bontoramba, Binamu, Turatea, Batang, Arungkeke, Tarowang, Kelara dan Rumbia, dengan jumlah desa/ kelurahan sebanyak 113 (seratus tiga belas) yaitu 85 (delapan puluh lima) desa dan 28 (dua puluh delapan) kelurahan.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 25 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Dinas PPKAD Kabupaten

Jeneponto, dan disahkan menjadi salah satu SKPD di Kabupaten Jeneponto pada tanggal 3 Agustus 2009. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan gabungan dari 2 Organisasi yang sudah ada sebelumnya, yaitu Bagian Keuangan Sekretariat Daerah dan Dinas Pendapatan Daerah.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto sebagai salah satu perangkat daerah di bawah Pemerintah Kabupaten Jeneponto, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

“Melaksanakan kewenangan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati”.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. Melakukan Pelayanan Umum
3. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Cabang Dinas di Bidang Pendapatan
4. Mengelola Urusan Ketatausahaan Dinas

B. Visi dan Misi Dinas PPKAD Kabupaten Jeneponto

VISI: Menjadi Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah yang Percaya, Akuntabel, Profesional, dan Melayani untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik.

MISI:

1. Mengembangkan kebijakan fiskal yang sehat, berkelanjutan, hati-hati, dan bertanggungjawab dalam peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan, penyesuaian prioritas pengeluaran, penurunan defisit fiskal, perbaikan kesinambungan fiskal, ketahanan sistem keuangan, dan kredibilitas kebijakan keuangan daerah
2. Meningkatkan pengelolaan asset daerah yang optimal sesuai dengan asas efisiensi, efektifitas, fungsional, kepastian hukum, transparan, dan bertanggungjawab
3. Membangun dan mengembangkan sumberdaya aparatur pengelola keuangan yang amanah, profesional, berintegritas, kompeten, dan berkinerja tinggi yang didukung oleh teknologi informasi pengelolaan keuangan
4. Meningkatkan kualitas pelayanan berdasarkan fungsi masing-masing bidang kegiatan dan prosedur operasi standar yang dimiliki
5. Mengedepankan akuntabilitas keuangan daerah.

C. Pengujian Persyaratan Statistik**1. Hasil Uji Validitas**

Pada penelitian ini, tahap awal proses analisis data adalah melakukan uji validitas instrumen terlebih dahulu. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga ketetapan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu kuesioner yang menjadi alat ukur dalam penelitian ini, instrumen yang valid menggambarkan bahwa suatu

instrumen benar-benar mampu dalam mengukur variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian, serta mampu menunjukkan tingkat kesesuaian antara konsep penelitian dengan hasil pengukuran.

Pada uji validitas, peneliti mengambil sampel sebanyak 53 responden. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui valid atau tidaknya data sebelum data tersebut diolah. Selain itu, uji validitas dilakukan agar lebih mengefesienkan waktu dalam pengambilan data dilapangan. Artinya, apabila 53 sampel yang didapat hasilnya valid secara keseluruhan, maka semua indikator telah mewakili semua instrumen. Tetapi bila terdapat sampel yang tidak valid dan tidak mewakili indikator yang ada, maka instrumen tersebut akan dihapus atau dibuang. Adapun rumus yang digunakan oleh peneliti dalam uji validitas ini adalah dibantu dengan bantuan SPSS versi 20. Item pertanyaan tersebut valid apabila nilai r hitung $\geq r$ tabel dan jika r hitung $\leq r$ tabel, berarti item atau butir instrumen dinyatakan tidak valid.

Tabel 4.1
Hasil Perhitungan Uji Validitas Kinerja Pegawai (X)

No.Instrumen	r Hitung	r Tabel	Keputusan
1	0,328	0,228	Valid
2	0,310	0,228	Valid
3	0,598	0,228	Valid
4	0,515	0,228	Valid
5	0,573	0,228	Valid
6	0,630	0,228	Valid
7	0,610	0,228	Valid
8	0,624	0,228	Valid
9	0,633	0,228	Valid

(Sumber: Data Kuesioner setelah diolah, bulan september tahun 2017)

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat diketahui 9 item pertanyaan variabel kinerja pegawai (X) dapat diketahui bahwa terdapat tiga butir pertanyaan yang dinyatakan tidak valid karena (r_{hitung}) korelasinya lebih rendah dari (r_{tabel}).

Hasil pengujian validitas instrumen penelitian yang valid sebanyak 9 item pertanyaan dan yang tidak valid sebanyak 3 item, artinya pertanyaan tersebut dihilangkan dan tidak perlu diganti karena indikator instrumen dapat mengukur dengan butir pertanyaan lainnya yang mengukur aspek yang sama, yaitu kinerja pegawai (X). Berikutnya hasil uji validitas instrumen variabel Peningkatan pendapatan pajak (Y) :

Tabel 4.2
Hasil Perhitungan Uji Validitas Variabel Peningkatan Pendapatan Pajak (Y)

No.Instrumen	r Hitung	r Tabel	Keputusan
10	0,793	0,228	Valid
11	0,563	0,228	Valid
12	0,667	0,228	Valid
13	0,505	0,228	Valid
14	0,491	0,228	Valid
15	0,774	0,228	Valid
16	0,319	0,228	Valid
17	0,699	0,228	Valid
18	0,690	0,228	Valid

(Sumber: Data Kuesioner setelah diolah, bulan september tahun 2017)

Berdasarkan table 4.2 diatas dapat diketahui 20 item pertanyaan variabel Peningkatan Pendapatan Pajak (Y) dapat diketahui bahwa terdapat 4 item pertanyaan yang dinyatakan tidak valid karena (r_{hitung}) korelasinya lebih rendah dari (r_{tabel}).

Hasil pengujian validitas instrumen penelitian yang valid sebanyak 9 item pertanyaan dan yang tidak valid sebanyak 4 item, artinya pertanyaan tersebut dihilangkan dan tidak perlu diganti karena indikator instrumen dapat mengukur dengan butir pertanyaan lainnya yang mengukur aspek yang sama, yaitu Peningkatan Pendapatan Pajak (Y).

2. Hasil Uji Reliabilitas

Guna menjaga kehandalan dari sebuah instrumen atau alat ukur maka peneliti melakukan uji reliabilitas, dimana instrumen yang dilakukan uji reliabilitas adalah instrumen yang dinyatakan valid, sedangkan instrumen yang dinyatakan tidak valid tidak bisa dilakukan uji reliabilitas. Dalam pengukuran reliabilitas menggunakan *Alpha Cronbach* dengan bantuan *SPSS for 20*. Adapun hasil dari uji reliabilitas yang telah dilakukan dalam penelitian ini adalah nilai *Alpha Cronbach* variabel Kinerja Pegawai (X), yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.3
Realibilitas Kinerja Pegawai (X)

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,669	,665	9

(Sumber: Data kuesioner diolah bulan september tahun 2017)

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa nilai koefisien Alpha adalah sebesar 0,669. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai nilai alphanya lebih dari 0,50. Maka hal ini dapat diartikan bahwa $0,669 > 0,50$ sehingga instrumennya reliabel.

Hasil pengujian reliabilitas instrumen yang hasilnya reliabel mengandung pengertian bahwa apabila instrumen pada suatu saat akan digunakan kembali untuk mengukur variabel yang sama, yaitu Kinerja Pegawai (X) maka hasilnya relatif akan sama. Dengan kata lain konsistensi dari hasil pengukuran dengan menggunakan instrumen yang sama. Berikutnya hasil dari uji reliabilitas yang

telah dilakukan dalam penelitian ini adalah *Alpha Crombach* variabel Peningkatan Pendapatan pajak (Y), yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.4
Reliabilitas Peningkatan pendapatan Pajak (Y)

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,746	,788	9

(Sumber: Data Kuesioner diolah bulan september tahun 2017)

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat diketahui bahwa nilai koefisien Alpha adalah sebesar 0,746. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai nilai alphanya lebih dari 0,50. Maka hal ini dapat diartikan bahwa $0,746 >$ dari 0,50 sehingga instrumennya reliabel.

Hasil pengujian reliabilitas instrumen yang hasilnya reliabel mengandung pengertian bahwa apabila instrumen pada suatu saat akan digunakan kembali untuk mengukur variabel yang sama, yaitu Peningkatan Pendapatan Pajak (Y) maka hasilnya relatif akan sama. Dengan kata lain konsistensi dari hasil pengukuran dengan menggunakan instrumen yang sama.

D. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mendeskripsikan hasil jawaban penyebaran kuesioner kepada para pegawai di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto, untuk mengetahui sejauhmana tanggapan mereka tentang Kinerja Pegawai Terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto.

1. Penyajian Data Kinerja Pegawai (X)

Pada penelitian ini indikator yang di gunakan pada Kinerja Pegawai (X), diukur dengan menggunakan 3 indikator berdasarkan teori (Kasmir, 2016:208) yaitu kualitas, Kuantitas, Ketetapan Waktu. Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran deskriptif mengenai tanggapan responden terhadap setiap indikator, Dalam penelitian ini kuesioner (angket) yang dibagikan menggunakan skala likert dengan 5 skala pengukuran, yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.5 presentase hasil nilai tanggapan responden perindikator

Jawaban	Keterangan
80% - 100%	Sangat Baik
60% - 79,99%	Baik
40% - 59,99%	Cukup Baik
20% - 39,99%	Tidak Baik
0% - 19,99%	Sangat Tidak Baik

a. Kualitas

Terdapat 3 pertanyaan yang berhubungan dengan indikator kualitas antara lain sebagai berikut :

Pertama, Melakukan pekerjaan dengan akurat jarang membuat kesalahan.

Responden menjawab sebagai berikut :

**Tabel 4.6
Melakukan pekerjaan dengan akurat**

Kritea Jawaban	X1			
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Sangat tidak akurat	1	1,9	1,9	1,9
Tidak akurat	1	1,9	1,9	3,8
Kurang akurat	4	7,5	7,5	11,3
Akurat	41	77,4	77,4	88,7
Sangat akurat	6	11,3	11,3	100,0
Total	53	100,0	100,0	

(Sumber: Data Kuesioner diolah bulan september tahun 2017, Pernyataan No.1)

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai pernyataan Melakukan pekerjaan dengan akurat dapat mempengaruhi kualitas kinerja pegawai di dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten jenepono dengan tingkat jawaban responden sebanyak 41 atau 77,4%, dengan kata lain melakukan pekerjaan dengan akurat sangatlah berpengaruh terhadap kualitas kinerja pegawai.

Kedua, Melakukan pekerjaan dengan mengutamakan hasil pekerjaan yang bermutu dan sesuai dengan peraturan yang ada. Responden menjawab sebagai berikut :

Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai pertanyaan Melakukan pekerjaan dengan mengutamakan hasil pekerjaan yang bermutu memiliki tingkat jawaban responden yang didominasi dengan jawaban “bermutu” dengan memperoleh tanggapan sebanyak 38 responden atau sebesar 71,7%, artinya kualitas kinerja pegawai sangat di pengaruhi dengan melakukan pekerjaan dengan mengutamakan hasil pekerjaan yang bermutu.

Tabel 4.7
Melakukan pekerjaan dengan mengutamakan hasil yang bermutu

Kriteria jawaban	X ²			Cumulative Percent
	Frequency	Percent	Valid Percent	
Sangat tidak bermutu	1	1,9	1,9	1,9
Kurang bermutu	6	11,3	11,3	13,2
Valid Bermutu	38	71,7	71,7	84,9
Sangat bermutu	8	15,1	15,1	100,0
Total	53	100,0	100,0	

(Sumber: Data kuesioner diolah bulan september tahun 2017, Pernyataan No. 2)

Ketiga, Berusaha menghasilkan kualitas kerja yang baik dibandingkan dengan rekan kerja. Responden menjawab sebagai berikut :

Tabel 4.8
Berusaha menghasilkan kualitas kerja yang baik dibandingkan dengan rekan kerja

Kriteria jawaban	Frequency	X3		Cumulative Percent
		Percent	Valid Percent	
Tidak baik	1	1,9	1,9	1,9
Kurang baik	15	28,3	28,3	30,2
Valid Baik	28	52,8	52,8	83,0
Sangat baik	9	17,0	17,0	100,0
Total	53	100,0	100,0	

(Sumber: Data Kuesioner diolah bulan september tahun 2017, Pernyataan No.3)

Berdasarkan tabel 4.8 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai pernyataan Berusaha menghasilkan kualitas kerja yang baik dibandingkan dengan rekan kerja, didominasi dengan jawaban “baik” dengan memperoleh tanggapan sebanyak 28 responden atau sebesar 52,8%, artinya untuk mencapai kualitas kinerja pegawai di dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten jeneponto memang di perlukan persaingan yang kompetitif dalam menghasilkan prestasi kerja sehingga mampu meningkatkan kualitas kerja yang baik.

Berikut hasil frekuensi dari indikator Kualitas yang berdasarkan teori dari (Kasmir, 2016:208) adalah sebagai berikut :

Berdasarkan tanggapan responden sebagaimana pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan “setuju” terhadap indikator kualitas kinerja pegawai di dinas pendapatan pengelolaan

keuangan dan aset daerah kabupaten jeneponto, dengan nilai 67,2% atau berada dalam kategori baik karena kualitas kinerja pegawai sangatlah penting dalam sebuah instansi pemerintahan agar mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan kepadanya, sehingga mempengaruhi peningkatan pendapatan pajak daerah kabupaten jeneponto.

Tabel 4.9
Frekuensi hasil indikator kualitas

No	Pilihan Jawaban Responden	Frekuensi Jawaban Responden Perindikator Pertanyaan Nomor			Jumlah	Presentasi (%)
		1	2	3		
1	A	1	1	0	2	1,2
2	B	1	0	1	2	1,2
3	C	4	6	15	25	16
4	D	41	38	28	107	67,2
5	E	6	8	9	23	14,4
Total		53	53	53	159	100

(Sumber: Pengolahan Nilai Kuesioner bulan september tahun 2017, No 1,2, dan 3)

b. Kuantitas

Terdapat 3 pernyataan yang berhubungan dengan indikator Kuantitas antara lain sebagai berikut :

Pertama, Melaksanakan beban kerja tanpa harus dibantu pegawai lain.

Responden menjawab sebagai berikut :

Berdasarkan tabel 4.10 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai melaksanakan beban kerja tanpa harus dibantu pegawai lain, didominasi dengan jawaban “setuju” dengan memperoleh tanggapan sebanyak 24 responden atau sebesar 45,3%, jawaban, artinya untuk mempengaruhi kuantitas kinerja pegawai di dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten jeneponto setiap pegawai harus mempunyai inisiatif tersendiri untuk

menyelesaikan pekerjaannya dengan melaksanakan beban kerja tanpa harus dibantu pegawai lain.

Tabel 4.10
Melaksanakan beban kerja tanpa harus dibantu pegawai lain

		X4			
Kriteria jawaban	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
Valid	Tidak setuju	1	1,9	1,9	1,9
	Kurang setuju	17	32,1	32,1	34,0
	Setuju	24	45,3	45,3	79,2
	Sangat setuju	11	20,8	20,8	100,0
	Total	53	100,0	100,0	

(Sumber: Data Kuesioner diolah bulan september tahun 2017, No.4)

Kedua, Menangani beban kerja sebagaimana yang ditugaskan atasan kepada pegawai. Responden menjawab sebagai berikut :

Tabel 4.11
Menangani beban kerja sebagaimana yang ditugaskan atasan kepada pegawai

		X5			
Kriteria jawaban	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
Valid	Kurang menangani	9	17,0	17,0	17,0
	Menangani	26	49,1	49,1	66,0
	Sangat menangani	18	34,0	34,0	100,0
	Total	53	100,0	100,0	

(Sumber: Data Kuesioner diolah bulan september tahun 2017, No.5)

Berdasarkan tabel 4.11 di atas dapat diketahui bahwa jawaban Menangani beban kerja sebagaimana yang ditugaskan atasan kepada pegawai, didominasi dengan jawaban “sering menangani” dengan memperoleh tanggapan sebanyak 26 responden atau sebesar 49,1%, artinya setiap pegawai harus bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan atasannya sehingga mampu menghasilkan kinerja

pegawai yang terpercaya, jujur dan bertanggung jawab yang sangat mempengaruhi kuantitas kinerja pegawai yang lebih baik.

Ketiga. Hasil pekerjaan lebih baik dibandingkan waktu yang lalu Responden menjawab sebagai berikut :

Tabel 4.12
Hasil pekerjaan lebih baik dibandingkan waktu yang lalu

Kriteria jawaban	Frequency	X6		Cumulative Percent
		Percent	Valid Percent	
Tidak baik	1	1,9	1,9	1,9
Kurang baik	14	26,4	26,4	28,3
Valid Baik	27	50,9	50,9	79,2
Sangat baik	11	20,8	20,8	100,0
Total	53	100,0	100,0	

(Sumber: Data Kuesioner diolah bulan september tahun 2017, No.6)

Berdasarkan tabel 4.12 di atas dapat diketahui bahwa jawaban mengenai pernyataan hasil pekerjaan lebih baik dibandingkan waktu yang lalu, didominasi dengan jawaban “baik” dengan memperoleh tanggapan sebanyak 27 responden atau sebesar 50,9%, artinya setiap pegawai mempunyai inovasi sendiri untuk lebih baik dari sebelumnya sehingga mempengaruhi kuantitas kinerja pegawai di dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten jeneponto.

Berikut hasil frekuensi dari indikator Kuantitas yang berdasarkan teori dari (Kasmir, 2016:208) dan bertumpu pada metodologi riset digunakan :

Berdasarkan tanggapan responden sebagaimana pada tabel 4.13 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan “setuju” terhadap indikator kuantitas kinerja pegawai di dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten jeneponto, dengan nilai 48,6% atau berada

dalam kategori cukup baik karena kuantitas kinerja pegawai sangatlah penting dalam sebuah instansi pemerintahan agar mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan jumlah pekerjaan yang telah di tentukan kepadanya, sehingga mampu mempengaruhi peningkatan pendapatan pajak daerah kabupaten jenepono.

Tabel 4.13
Frekuensi hasil indikator Kuantitas

No	Pilihan Jawaban Responden	Frekuensi Jawaban Responden Perindikator Pertanyaan Nomor			Jumlah	Presentasi (%)
		4	5	6		
1	A	0	0	0	0	0
2	B	1	0	1	2	1,2
3	C	17	9	14	40	25,1
4	D	24	26	27	77	48,6
5	E	11	18	11	40	25,1
Total		53	53	53	159	100

(Sumber: Pengolahan Nilai Kuesioner bulan september tahun 2017, No 4, 5, dan 6)

c. Ketetapan Waktu

Terdapat 3 pertanyaan yang berhubungan dengan indikator Ketetapan Waktu antara lain sebagai berikut :

Pertama, Datang dan pulang kerja sesuai dengan waktu yang ditentukan instansi. Responden menjawab sebagai berikut :

Tabel 4.14
Datang dan pulang kerja sesuai dengan waktu yang ditentukan instansi
X7

Kriteria jawaban	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Kurang sesuai	18	34,0	34,0	34,0
Sesuai	26	49,1	49,1	83,0
Sangat sesuai	9	17,0	17,0	100,0
Total	53	100,0	100,0	

(Sumber: Data Kuesioner diolah bulan september tahun 2017, No.7)

Berdasarkan tabel 4.14 di atas dapat diketahui bahwa jawaban mengenai pernyataan Datang dan pulang kerja sesuai dengan waktu yang ditentukan instansi, didominasi dengan jawaban “Sesuai” dengan memperoleh tanggapan sebanyak 26 responden atau sebesar 49,1% %, artinya dengan taat pada aturan ketentuan waktu yang telah ditetapkan instansi maka mampu menghasilkan kinerja pegawai yang lebih baik dan mempunyai disiplin kerja yang sangat bagus sehingga mempengaruhi kinerja pegawai di dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten jenepono.

Kedua, Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu atau jam yang telah ditentukan. Responden menjawab sebagai berikut :

Tabel 4.15
Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu atau jam yang telah ditentukan

Kriteria jawaban	Frequency	X8		Cumulative Percent
		Percent	Valid Percent	
Valid Kurang sesuai	9	17,0	17,0	17,0
Sesuai	33	62,3	62,3	79,2
Sangat sesuai	11	20,8	20,8	100,0
Total	53	100,0	100,0	

(Sumber: Data Kuesioner diolah bulan september tahun 2017, No.8)

Berdasarkan tabel 4.15 di atas dapat diketahui bahwa jawaban mengenai pernyataan Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu atau jam yang telah ditentukan, didominasi dengan jawaban “Sesuai” dengan memperoleh tanggapan sebanyak 33 responden atau sebesar 62,3%, artinya setiap pegawai harus disiplin dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang telah di tentukan sehing sangat

mempengaruhi kinerja pegawai di dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten jeneponto.

Ketiga, Ruangan atau tempat melakukan absensi elektronik strategis.

Responden menjawab sebagai berikut :

Tabel 4.16
Dalam pelaksanaan kerja selalu memperhatikan prosedur kerja yang telah ditetapkan oleh instansi

Kriteria jawaban	X9			
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak memperhatikan	1	1,9	1,9	1,9
Kurang memperhatikan	7	13,2	13,2	15,1
Valid Memperhatikan	33	62,3	62,3	77,4
Sangat memperhatikan	12	22,6	22,6	100,0
Total	53	100,0	100,0	

(Sumber: Data Kuesioner diolah bulan september tahun 2017, No.9)

Berdasarkan tabel 4.16 di atas dapat diketahui bahwa jawaban mengenai pernyataan Dalam pelaksanaan kerja selalu memperhatikan prosedur kerja yang telah ditetapkan oleh instansi, didominasi dengan jawaban “Memperhatikan” dengan memperoleh tanggapan sebanyak 33 responden atau sebesar 62,3%, artinya setiap pegawai selalu memperhatikan prosedur yang ada sehingga dapat mencegah adanya kesalahan dalam pekerjaan, dengan itu kinerja pegawai di dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten jeneponto akan semakin baik.

Berikut hasil frekuensi dari indikator Ketetapan waktu, yaitu sebagai berikut :

Berdasarkan tanggapan responden sebagaimana pada tabel 4.17 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan “setuju”

terhadap indikator ketetapan waktu kinerja pegawai di dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten jenepono, dengan nilai 58% atau berada dalam kategori cukup baik karena ketetapan waktu sangatlah penting dalam sebuah instansi pemerintahan agar mampu melaksanakan tugasnya dengan disiplin dan bertanggung jawab.

Tabel 4.17
Frekuensi hasil indikator ketetapan waktu

No	Pilihan Jawaban Responden	Frekuensi Jawaban Responden Perindikator Pertanyaan Nomor			Jumlah	Presentasi (%)
		7	8	9		
1	A	0	0	0	0	0
2	B	0	0	1	1	0,6
3	C	18	9	7	34	21,3
4	D	26	33	33	92	58
5	E	9	11	12	32	20,1
Total		53	53	53	159	100

(Sumber: Pengolahan Nilai Kuesioner bulan september tahun 2017, No 7, 8, dan 9)

2. Indeks tanggapan responden perindikator

Berdasarkan hasil penelitian tentang beberapa indikator kinerja pegawai maka dapat di rangkum dalam satu tabel, yaitu sebagai beriku :

Tabel.18

Indeks Indikator Kinerja pegawai

NO	Indikator	Rata-rata Skor	Kategori
1	Kualitas	68,17%	Baik
2	Kuantitas	79,74%	Baik
3	Ketetapan Waktu	79,49%	Baik

(Sumber: Pengolahan Hasil penelitian tahun 2017)

Berdasarkan tabel 4.18 diatas dapat dilihat pengaruh dari 3 Indikator Kinerja pegawai terdapat bahwa nilai indikator Kualitas sebanyak 68,17% dan

termasuk dalam kategori Baik, nilai dari indikator Kuantitas sebanyak 78,81% termasuk kategori Baik, sedangkan nilai indikator Ketetapan Waktu sebanyak 79,49% termasuk dalam kategori Baik. Hasil persentase tabel di atas yang menunjukkan nilai tanggapan responden terhadap indikator Kuantitas lebih banyak dipilih dan paling berpengaruh di antara indikator lainnya. Kesimpulannya kinerja pegawai di dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten jeneponto sangat dipengaruhi oleh Kuantitas, sehingga menghasilkan pegawai yang disiplin dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugasnya dengan baik.

3. Analisis Variabel Kinerja Pegawai (X)

Setelah dilakukan analisis validitas dari instrumen untuk variabel kinerja pegawai (X). Maka data yang valid terdiri dari 9 instrumen, maka terdapat hasil sebagai berikut :

- a. Bila setiap butir pernyataan mendapat skor tertinggi, yaitu $5 \times 9 \times 53 = 2.385$
- b. Bila setiap butir pernyataan mendapat skor terendah, yaitu $1 \times 9 \times 53 = 477$

Keterangan :

Skor tertinggi = 5

Skor terendah = 1

Jumlah responden = 53

Jumlah skor pengumpulan data variabel x = 1888

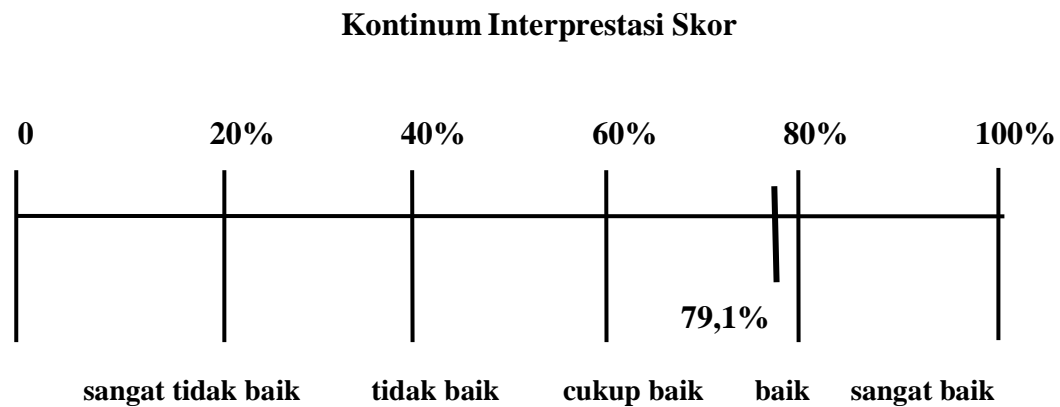
Rata-rata skor ideal = $\frac{\text{Jumlah skor tertinggi}}{\text{Jumlah responden}} = \frac{2.385}{53} = 45$

Menurut 53 responden mengenai Kinerja pegawai yaitu :

Jumlah skor variabel (X) x 100% = $\frac{1.888}{53} \times 100\% = 79,1\%$

Jumlah skor tertinggi $\overline{2.385}$

Dari hasil 79,1% yang ditetapkan, hal ini secara kontinum dapat dibuat kategori (Sugiyono, 2010:110), sebagai berikut :



Gambar 4.1

Keterangan interpretasi skor :

Angka 0%-10% = sangat tidak baik

Angka 21%-40% = tidak baik

Angka 41-60% = cukup baik

Angka 61%-80% = baik

Angka 81%-100% = sangat baik

Dari perhitungan dan keterangan gambar diatas dapat diketahui bahwa kinerja pegawai di dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten jeneponto berada Angka 61% - 80% = baik. Hal ini terlihat dari nilai 79,1% termasuk kategoribaik.

4. Peningkatan Pendapatan Pajak (Y)

Pada penelitian ini indikator yang di gunakan pada Peningkatan pendapatan pajak (Y) diukur dengan menggunakan 3 indikator berdasarkan teori

(Sitorus, 2008:34) yaitu optimalisasi objek pajak, optimalisasi pemungutan pajak, dan optimalisasi penerimaan dari objek pajak yang terdaftar. Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran deskriptif mengenai tanggapan responden terhadap setiap indikator, Dalam penelitian ini kuesioner (angket) yang dibagikan menggunakan skala likert dengan 5 skala pengukuran, yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.19 presentase hasil nilai tanggapan responden perindikator

Jawaban	Keterangan
80% - 100%	Sangat Baik
60% - 79,99%	Baik
40% - 59,99%	Cukup Baik
20% - 39,99%	Tidak Baik
0% - 19,99%	Sangat Tidak Baik

a. Optimalisasi objek pajak

Terdapat 3 pernyataan yang berhubungan dengan indikator Optimalisasi pendapatan pajak antara lain sebagai berikut :

Pertama, Melakukan identifikasi pembayar pajak baru/potensial,

Responden menjawab sebagai berikut :

**Tabel 4.20
Melakukan identifikasi pembayar pajak baru/potensial**

Kriteria jawaban	Frequency	Y1		Cumulative Percent
		Percent	Valid Percent	
Kurang melakukan	18	34,0	34,0	34,0
Melakukan	26	49,1	49,1	83,0
Selalu melakukan	9	17,0	17,0	100,0
Total	53	100,0	100,0	

(Sumber: Data kuesioner diolah bulan september tahun 2017, No.10)

Berdasarkan tabel 4.20 di atas dapat diketahui bahwa jawaban mengenai pernyataan Melakukan identifikasi pembayar pajak baru/potensial, didominasi dengan jawaban “Melakukan” dengan memperoleh tanggapan sebanyak 26 responden atau sebesar 49,1%, artinya dengan adanya pembayar pajak baru/potensial maka dapat memperbanyak objek pemungutan pajak dan secara otomatis akan meningkatkan pendapatan pajak di dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten jenepono.

Kedua, Memperbaiki basis data objek pajak. Responden menjawab sebagai berikut :

Tabel 4.21
Memperbaiki basis data objek pajak

Kriteria jawaban	Frequency	Y2		Cumulative Percent
		Percent	Valid Percent	
Kurang setuju	15	28,3	28,3	28,3
Setuju	26	49,1	49,1	77,4
Sangat setuju	12	22,6	22,6	100,0
Total	53	100,0	100,0	

(Sumber: Data Kuesioner diolah bulan september tahun 2017, No. 11)

Berdasarkan tabel 4.21 di atas dapat diketahui bahwa jawaban mengenai pernyataan Memperbaiki basis data objek pajak, didominasi dengan jawaban ”setuju” dengan memperoleh tanggapan sebanyak 26 responden atau sebesar 49,1%, jawaban, dengan memperbaiki basis objek pajak maka dalam mengoptimisasi objek pajak akan semakin baik dan dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan pajak di dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten jenepono.

Ketiga. Memperbaiki kapasitas dari setiap jenis pungutan pajak.

Responden menjawab sebagai berikut:

Tabel 4.22
Memperbaiki kapasitas dari setiap jenis pungutan pajak

Kriteria jawaban	Y3			Cumulative Percent
	Frequency	Percent	Valid Percent	
Sangat tidak setuju	1	1,9	1,9	1,9
Tidak setuju	4	7,5	7,5	9,4
Kurang setuju	16	30,2	30,2	39,6
Setuju	21	39,6	39,6	79,2
Sangat setuju	11	20,8	20,8	100,0
Total	53	100,0	100,0	

(Sumber: Data Kuesioner diolah bulan september tahun tahun 2017, No.12)

Berdasarkan tabel 4.22 di atas dapat diketahui bahwa jawaban mengenai pernyataan Memperbaiki kapasitas dari setiap jenis pungutan pajak, didominasi dengan jawaban "setuju" dengan memperoleh tanggapan sebanyak 21 responden atau sebesar 39,6%, jawaban, dengan memperbaiki kapasitas dari setiap jenis pungutan pajak maka akan mempermudah dalam mengoptimisasi objek pajak yang sangat mempengaruhi peningkatan pendapatan pajak daerah di dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten jeneponto.

Berikut hasil frekuensi dari indikator Optimalisasi pendapatan pajak:

Berdasarkan tanggapan responden sebagaimana pada tabel 4.23 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan "setuju" terhadap indikator optimalisasi objek pajak di dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten jeneponto, dengan nilai 46% atau berada dalam kategori cukup baik dengan mengoptimisasi objek pajak sangatlah penting karena dapat mempermudah dalam mengidentifikasi objek baru/potensial

sehingga mampu meningkatkan pendapatan pajak di dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten jeneponto.

Tabel 4.23
Frekuensi hasil indikator optimalisasi objek pajak

No	Pilihan Jawaban Responden	Frekuensi Jawaban Responden Perindikator Pertanyaan Nomor			Jumlah	Presentasi (%)
		10	11	12		
1	A	0	0	1	1	0,6
2	B	0	0	4	4	2,5
3	C	18	15	16	49	30,8
4	D	26	26	21	73	46
5	E	9	12	11	32	20,1
Total		53	53	53	159	100

(Sumber: Pengolahan Nilai Kuesioner bulan september tahun 2017, No. 10, 11, dan 12)

b. Optimalisasi pemungutan pajak

Terdapat 3 pernyataan yang berhubungan dengan indikator optimalisasi pendapatan pajakantara lain sebagai berikut :

Pertama, Mengubah tarif pembayaran pajak terhadap setiap wajib pajak.

Responden menjawab sebagai berikut :

Tabel 4.24
Mengubah tarif pembayaran pajak terhadap setiap wajib pajak

Kriteria jawaban	Y4			
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak setuju	1	1,9	1,9	1,9
Kurang setuju	11	20,8	20,8	22,6
Valid Setuju	34	64,2	64,2	86,8
Sangat setuju	7	13,2	13,2	100,0
Total	53	100,0	100,0	

(Sumber: Data Kuesioner diolah bulan september tahun 2017, No.13)

Berdasarkan tabel 4.24 di atas dapat diketahui bahwa jawaban mengenai pernyataan Mengubah tarif pembayaran pajak terhadap setiap wajib pajak,

didominasi dengan jawaban ”setuju” dengan memperoleh tanggapan sebanyak 34 responden atau sebesar 64,2%, artinya pemerintah yang berwenang dalam pemungutan pajak bisa saja sewaktu-waktu mengubah tarif pajak sesuai dengan aturan yang berlaku baik tarif pajak dinaikkan maupun di turunkan dengan tujuan mempermudah dalam pemungutan pajak sehingga meningkatkan pendapatan pajak daerah kabupaten jeneponto.

Kedua, Adanya penerapan sanksi terhadap penunggak pajak. Responden menjawab sebagai berikut :

Tabel 4.25
Adanya penerapan sanksi terhadap penunggak pajak

Kriteria jawaban	Y5			
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak setuju	1	1,9	1,9	1,9
Kurang setuju	5	9,4	9,4	11,3
Valid Setuju	28	52,8	52,8	64,2
Sangat setuju	19	35,8	35,8	100,0
Total	53	100,0	100,0	

(Sumber: Data Kuesioner diolah bulan september tahun 2017, No.14)

Berdasarkan tabael 4.25 diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden mengenai pernyataan Adanya penerapan sanksi terhadap penunggakn pajak, didominasi oleh jawaban “setuju” memperoleh tanggapan sebanyak 28 responden atau sebesar 52,8%, jawaban, dengan memberikan sanksi kepada penunggak pajak maka dapat memberikan efek jera kepada setiap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya sehingga dapat meminimalisir wajib pajak yang menunggak, agar mengoptimalisasi pemungutan pajak dapat terlaksana dengan

baik dan sangat berpengaruh pada peningkatan pendapatan pajak daerah kabupaten jenepono.

Ketiga. Meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan pajak, Responden menjawab sebagai berikut :

Tabel 4.26
Meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan pajak

Kriteria jawaban	Y6			
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Kurang meningkat	15	28,3	28,3	28,3
Meningkat	26	49,1	49,1	77,4
Selalu meningkat	12	22,6	22,6	100,0
Total	53	100,0	100,0	

(Sumber: Data Kuesioner diolah bulan september tahun 2017, Pernyataan No. 15)

Berdasarkan tabel 4.26 di atas dapat diketahui jawaban responden mengenai pernyataan Meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan pajak, didominasi oleh jawaban “meningkat” memperoleh tanggapan sebanyak 26 responden atau sebesar 49,1%, artinya dengan mengefisienkan pemungutan dari setiap jenis pemungutan pajak maka pelaksanaan pemungutan pajak akan lebih mudah dan cepat sehingga mempengaruhi peningkatan pendapatan pajak daerah di kabupaten jenepono.

Berikut hasil frekuensi dari indikator Optimalisasi pemungutan pajak yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan tanggapan responden sebagaimana pada tabel 4.27 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan “setuju” terhadap indikator optimalisasi pemungutan pajak di dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten jenepono, dengan nilai 55,4%

atau berada dalam kategori baik dengan mengoptimalkan pemungutan pajak sangatlah penting karena dapat mengefisienkan dan mempermudah pemungutan pajak sehingga mampu meningkatkan pendapatan pajak di dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten jeneponto.

Tabel 4.27
Frekuensi hasil indikator Optimalisasi pemungutan pajak

No	Pilihan Jawaban Responden	Frekuensi Jawaban Responden Perindikator Pertanyaan Nomor			Jumlah	Presentasi (%)
		13	14	15		
1	A	0	0	0	0	0
2	B	1	1	0	2	1,2
3	C	11	5	15	31	19,4
4	D	24	28	26	88	55,4
5	E	7	19	12	38	24
Total		53	53	53	159	100

(Sumber: Pengolahan Nilai Kuesioner bulan september tahun 2017, No. 13, 14, dan 15)

c. Optimalisasi penerimaan dari wajib pajak yang terdaftar

Terdapat 3 pernyataan yang berhubungan dengan indikator Optimalisasi penerimaan dari wajib pajak yang terdaftar antara lain sebagai berikut :

Pertama, Adanya penyederhanaan administrasi pajak. Responden

menjawab sebagai berikut :

Tabel 4.28

Adanya penyederhanaan administrasi pajak

Kriteria jawaban	Y7			Cumulative Percent
	Frequency	Percent	Valid Percent	
Sangat tidak ada	1	1,9	1,9	1,9
Tidak ada	4	7,5	7,5	9,4
Kurang ada	16	30,2	30,2	39,6
Ada	21	39,6	39,6	79,2
Sangat ada	11	20,8	20,8	100,0
Total	53	100,0	100,0	

(Sumber: Data Kuesioner diolah bulan september tahun 2017, No.16)

Berdasarkan tabel 4.28 di atas dapat diketahui jawaban responden mengenai pernyataan Adanya penyederhanaan administrasi pajak, didominasi oleh jawaban “ada” memperoleh tanggapan sebanyak 21 responden atau sebesar 39,6%, jawaban, artinya dengan adanya penyederhanaan administrasi pajak maka akan mempermudah para pegawai maupun wajib pajak untuk membayar kewajibannya sebagai wajib pajak yang terdaftar sehingga proses pengoptimalisasian pemungutan pajak dapat berjalan baik dan menunjang peningkatan pendapatan pajak daerah kabupaten jeneponto.

Kedua, Meningkatkan kordinasi dengan instansi terkait Responden menjawab sebagai berikut :

Tabel 4.29
Meningkatkan kordinasi dengan isntansi yang terkait

Kriteria jawaban	Frequency	Y8		Cumulative Percent
		Percent	Valid Percent	
Tidak setuju	1	1,9	1,9	1,9
Kurang setuju	11	20,8	20,8	22,6
Valid Setuju	34	64,2	64,2	86,8
Sangat setuju	7	13,2	13,2	100,0
Total	53	100,0	100,0	

(Sumber: Data Kuesioner diolah bulan september tahun 2017, No.17)

Berdasarkan tabel 4.29 di atas dapat diketahui jawaban responden mengenai pernyataan Meningkatkan kordinasi dengan instansi yang terkait, didominasi oleh jawaban “setuju” memperoleh tanggapan sebanyak 34 responden atau sebesar 64,2%, jawaban, dengan meningkatkan kordinasi dengan instansi terkait akan mempermudah dalam proses mengoptimalisasi penerimaan dari wajib

pajak yang terdaftar sehingga mempengaruhi peningkatan pendapatan pajak daerah kabupaten jenepono.

Ketiga, Adanya sosialisasi kepada masyarakat melalui kampanye sadar akan pembayaran pajak. Responden menjawab sebagai berikut

Tabel 4.30
Adanya sosialisasi kepada masyarakat melalui kampanye sadar akan pembayaran pajak

Kriteria jawaban	Frequency	Y9		Cumulative Percent
		Percent	Valid Percent	
Tidak ada	1	1,9	1,9	1,9
Kurang ada	5	9,4	9,4	11,3
Valid Ada	28	52,8	52,8	64,2
Selalu ada	19	35,8	35,8	100,0
Total	53	100,0	100,0	

(Sumber: Data Kuesioner diolah bulan agustus 2017, No. 18)

Berdasarkan tabel 4.30 di atas dapat diketahui jawaban responden mengenai pernyataan Adanya sosialisasi kepada masyarakat melalui kampanye sadar akan pembayaran pajak, didominasi oleh jawaban “Ada” memperoleh tanggapan sebanyak 28 responden atau sebesar 52,8%, jawaban, artinya dalam optimalisasi penerimaan dari wajib pajak yang terdaftar di dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten jenepono selalu ada sosialisasi pemahaman sadar akan pembayaran pajak kepada masyarakat agar proses pengoptimalisasian penerimaan dari wajib pajak yang terdaftar bisa berjalan dengan baik dan mencapai target-target yang telah di tetapkan sebelumnya.

Berikut hasil frekuensi dari indikator Optimalisasi penerimaan dari wajib pajak yang terdaftar , yaitu :

Tabel 4.31
Frekuensi hasil indikator Optimalisasi penerimaan dari wajib pajak yang terdaftar

No	Pilihan Jawaban Responden	Frekuensi Jawaban Responden Perindikator Pertanyaan Nomor			Jumlah	Presentasi (%)
		16	17	18		
1	A	1	0	0	1	0,6
2	B	4	1	1	6	4
3	C	16	11	5	32	20
4	D	21	34	28	83	52,2
5	E	11	7	19	37	23,2
Total		53	53	53	159	100

(Sumber: Pengolahan Nilai Kuesioner bulan september tahun 2017, No. 16, 17, dan 18)

Berdasarkan tanggapan responden pada tabel 4.31 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan “setuju” terhadap indikator optimalisasi penerimaan dari wajib pajak yang terdaftar di dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten jenepono, dengan nilai 52,2% atau berada dalam kategori baik dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dari wajib pajak yang terdaftar sangatlah penting karena dapat menyederhanakan administrasi pajak sehingga mempermudah pemungutan pajak dan mampu meningkatkan pendapatan pajak di dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten jenepono.

5. Indeks tanggapan responden perindikator

Berdasarkan hasil penelitian tentang beberapa indikator peningkatan pendapatan pajak di dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten jenepono. Maka dapat di rangkum dalam satu tabel, yaitu sebagai berikut :

Tabel . 32
Indeks Indikator peningkatan pendapatan pajak

NO	Indikator	Rata-rata Skor	Kategori
1	Optimalisasi objek pajak	76,47%	Baik
2	Optimalisasi pemungutan pajak	80,37%	Sangat Baik
3	Optimalisasi penerimaan dari wajib pajak yang terdaftar	78,73%	Baik

(Sumber: Pengolahan Hasil penelitian tahun 2017)

Berdasarkan tabel 4.32 diatas dapat dilihat pengaruh dari 3 Indikator peningkatan pendapatan pajak terdapat bahwa nilai indikator optimalisasi objek pajak sebanyak 76,47% dan termasuk dalam kategori Baik, nilai dari indikator Optimalisasi pemungutan pajak sebanyak 8037% atau termasuk kategori sangat Baik, sedangkan nilai indikator optimalisasi penerimaan dari wajib pajak yang terdaftar sebanyak 78,73% termasuk dalam kategori Baik. Hasil persentase tabel di atas yang menunjukkan nilai tanggapan responden terhadap indikator “optimalisasi pemungutan pajak” lebih banyak dipilih dan paling berpengaruh di antara indikator lainnya. Kesimpulannya peningkatan pendapatan pajak di dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten jeneponto sangat dipengaruhi oleh optimalisasi pemungutan pajak, karena dapat mengefesienkan dan mempermudah pelaksanaan pemungutan pajak sehingga mampu meningkatkan pendapatan pajak di dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten jeneponto.

6. Analisis Variabel Peningkatan Pendapatan Pajak (Y)

Setelah dilakukan analisis validitas dari 9 instrumen untuk variabel Peningkatan Pendapatan Pajak(Y). Maka data yang valid terdiri dari 9 instrumen, maka terdapat hasil sebagai berikut :

- a. Bila setiap butir pernyataan mendapat skor tertinggi, yaitu $5 \times 9 \times 53 = 2.385$
- b. Bila setiap butir pernyataan mendapat skor terendah, yaitu $1 \times 9 \times 53 = 477$

Keterangan :

Skor tertinggi = 5

Skor terendah = 1

Jumlah responden = 53

Jumlah skor pengumpulan data variabel Y = 1874

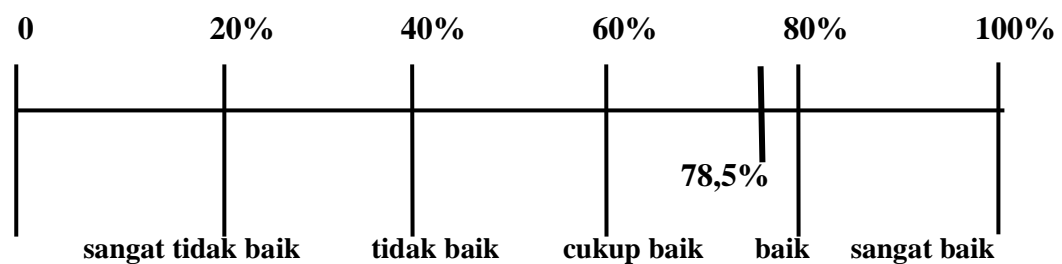
Rata-rata skor ideal = $\frac{\text{Jumlah skor tertinggi}}{\text{Jumlah responden}} = \frac{2.385}{53} = 45$

Menurut 53 responden mengenai Peningkatan pendapatan pajak yaitu :

$\frac{\text{Jumlah skor variabel (Y)}}{\text{Jumlah skor tertinggi}} \times 100\% = \frac{1.874}{2.385} = 78,5\%$

Dari hasil 78,5 persen yang ditetapkan, hal ini secara kontinum dapat dibuat kategori (Sugiyono, 2010:110), sebagai berikut :

Kontinum Interpretasi Skor Peningkatan Pendapatan pajak



Gambar 4.2

Keterangan interpretasi skor :

Angka 0%-10% = sangat tidak baik

Angka 21%-40% = tidak baik

Angka 41-60% = cukup baik

Angka 61%-80% = baik

Angka 81%-100%= sangat baik

Berdasarkan perhitungan dan keterangan gambar diatas dapat diketahui bahwa Peningkatan pendapatan pajak di dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten jeneponto cukup baik. Hal ini terlihat dari nilai 78,5% termasuk kategori cukup baik.

E. Pengaruh Kinerja Pegawai Terhadap peningkatan Pendapatan Pajak di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto

1. Analisis Deskriptif

Tabel 4.33 Data skor total item kuesioner

NO.	Kinerja Pegawai (X)	Peningkatan Pendapatan Pajak (Y)
1	39	39
2	38	39
3	40	37
4	38	38
5	33	36
6	39	42
7	33	33
8	31	31
9	33	31
10	33	36
11	33	36
12	34	33
13	34	30
14	33	32
15	35	30
16	32	36
17	41	37
18	37	35
19	41	40
20	36	35
21	39	39
22	33	30
23	35	36
24	34	32
25	40	38

No	Kinerja Pegawai (X)	Peningkatan Pendapatan Pajak (Y)
26	41	37
27	35	39
28	36	37
29	32	39
30	39	36
31	36	39
32	38	37
33	27	23
34	37	35
35	34	30
36	40	44
37	39	39
38	38	39
39	40	37
40	38	38
41	33	36
42	39	42
43	33	33
44	31	31
45	33	31
46	33	36
47	33	36
48	34	33
49	34	30
50	33	32
51	35	30
52	32	36
53	41	37

(Sumber: diolah dari data responden bulan september tahun2017)

Berdasarkan data diatas, maka dapat dilakukan analisis deskriptif untuk menggambarkan data-data penelitian yang dihasilkan. Untuk lebih jelas dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.34 Analisis deskriptif

		Descriptive Statistics			
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X	53	27,00	41,00	35,6226	3,27124
Y	53	23,00	44,00	35,3396	3,90238
Valid N (listwise)	53				

Output Analisis Descriptive

Sumber: Data diolah dari hasil responden bulan september tahun 2017

Berdasarkan output di atas dapat diketahui bahwa variabel x dengan jumlah data (N) sebanyak 53 mempunyai nilai rata-rata 35,62, dengan nilai minimum 27 dan maksimal 41, sedangkan standar deviasi sebesar 3,271. Dan variabel y dengan jumlah data (N) sebanyak 53 mempunyai rata-rata sebesar 35,33, dengan nilai minimum 23 dan maksimal 44 sedangkan standar deviasi sebesar 3,902

2. Pengujian Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinan

Untuk menghitung besarnya pengaruh antara variabel Kinerja pegawai (X) terhadap variabel Peningkatan pendapatan pajak (Y), kemudian dapat dilakukan dengan cara menghitung koefisien yang ditentukan. Berikut adalah *model Summary* berdasarkan hasil pengolahan data melalui SPSS versi 20.

Tabel 4.35
Koefisien Determinan

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,697 ^a	,486	,476	2,82492

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

(Sumber : Data KUESIONER diolah bulan september tahun 2017)

Berdasarkan tabel 4.35 koefisien *Determinan* adalah sebesar 0,697, R_{square} adalah koefisien determinan yang didapat hasil 0,486 berarti kontribusi variabel kinerja pegawai (X) terhadap variabel peningkatan pendapatan pajak (Y) sebesar yaitu sebesar 48,6 persen dan sisanya 51,4 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor

lain. Hal ini menunjukkan hubungan antar kedua variabel kuat karena semakin besar angka R Square maka semakin kuat hubungan antar keduanya.

b. Regresi Linear Sederhana

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel kinerja pegawai (X) terhadap variabel peningkatan pendapatan pajak (Y), maka menggunakan rumus regresi linear sebagai berikut :

$$\text{Rumus : } Y' = a + bX$$

Keterangan :

Y' = Subjek atau nilai dalam dependen yang diprediksikan

a = Harga Y , apabila $X=0$ (harfa konstan).

B = Angka arah atau koefisien korelasi yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila $b (+)$ maka naik, bila $(-)$ maka terjadi penurunan.

X = Subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu.

Berdasarkan hasil pengolahan data analisis regresi linear sederhana melalui SPSS versi 20, maka diperoleh nilai (a) dan (b), yaitu:

Tabel 4.36
Regresi Linear Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5,713	4,284		1,334	,188
X	,832	,120	,697	6,945	,000

a. Dependent Variable: Y

(Sumber : Data Kuesioner diolah bulan september tahun 2017)

Berdasarkan tabel 4.36 diatas maka dapat dilihat $a = 5,713$ dan $b = 0,832$ kemudian disusun persamaan regresinya yaitu :

$$Y' = a + bX$$

$$Y = 5,713 + 0,832$$

Keterangan :

Y : Peningkatan Pendapatan Pajak

X : Kinerja Pegawai

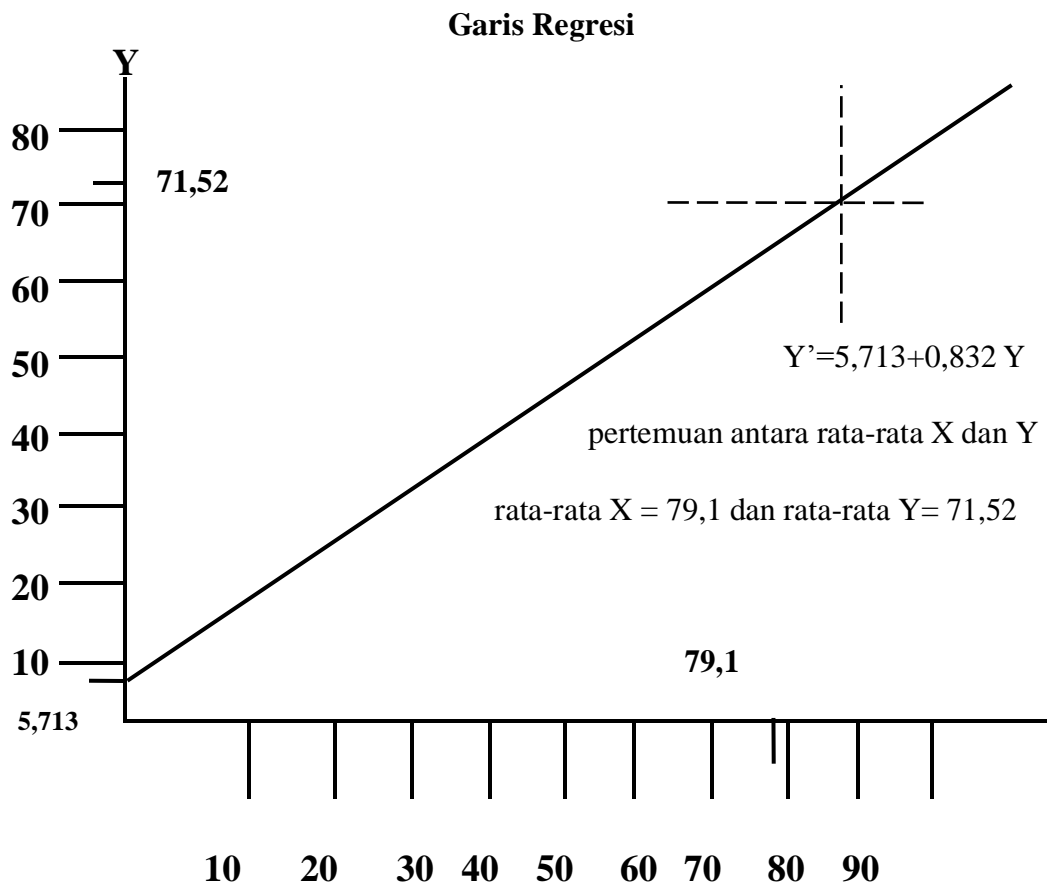
a : Konstanta sebesar 5,713, artinya jika Kinerja pegawai di dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten jeneponto (X) nilainya 0, maka Peningkatan pendapatan pajak di dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten jeneponto (Y) nilainya positif sebesar 5,713.

b : Koefisien regresi sebesar 0,832, artinya jika Kinerja pegawai di dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten jeneponto (X) mengalami kenaikan 1, maka nilai Peningkatan pendapatan pajak di dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten jeneponto (Y) mengalami peningkatan sebesar 0,832.

Diketahui dari hasil perhitungan kinerja pegawai (X) sebesar 79,1%, maka persamaan regresinya, adalah :

$$\begin{aligned} Y' &= a + bX \\ &= 5,713 + 0,832 (79,1) \\ &= 5,713 + 65,8112 \\ &= 71,52 \end{aligned}$$

Dari persamaan diatas dapat dilihat garis regresi, dapat digambarkan berdasarkan persamaan yang telah ditentukan, yaitu :



Gambar 4.3

F. Interpretasi Hasil Penelitian

Dari uji coba diatas diketahui interpretasi penelitian yang berjudul Pengaruh Kinerja Pegawai Terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto, yaitu untuk menguji koefisien korelasi adalah jika r_{hitung} lebih besar (\geq) dari r_{tabel} , maka H_a diterima dan H_o ditolak. Sebaliknya jika r_{hitung} lebih kecil (\leq) dari r_{tabel} , maka H_o diterima dan H_a ditolak. Dari hasil perhitungan terlihat bahwa $r_{hitung} 0,697 > r_{tabel} 0,228$ maka H_o ditolak dan H_a diterima. Sehingga terdapat pengaruh

signifikan antara kinerja pegawai terhadap di Dinas pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto.

Adapun variabel yang digunakan untuk mengukur kinerja pegawai (X) pada penelitian ini dengan memakai teori (Kasmir, 2016:208) yaitu kualitas kuantitas, dan ketetapan waktu, dari hasil tanggapan responden perindikator yang paling berpengaruh terhadap kinerja pegawai adalah indikator kuantitas dengan hasil nilai sebanyak 79,74% atau dalam kategori baik. Sedangkan yang digunakan untuk mengukur variabel peningkatan pendapatan pajak dengan memakai teori (Sitorus, 2008:34) yaitu, optimalisasi objek pajak, optimalisasi pemungutan pajak, dan optimalisasi penerimaan dari wajib pajak yang terdaftar, hasil indeks tanggapan responden perindikator yang paling berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan pajak adalah indikator pemungutan pajak dengan hasil nilai sebanyak 80,37% atau dalam kategori sangat baik.

Berbeda dengan Nafilah (2013) dalam penelitiannya Pengaruh Intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar Studi kasus di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar. Berdasarkan Analisis penelitiannya bahwa pentingnya pajak bagi penerimaan negara /peningkatan keuangan daerah. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, maka pemerintah melakukan berbagai macam usaha. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah yaitu dengan melakukan intensifikasi pemungutan pajak. Dengan dilakukannya intensifikasi pemungutan pajak, maka pemerintah mengharapkan penerimaan pajak dapat lebih optimal dan mencapai target yang sudah ditetapkan sebelumnya.

pengaruh Kinerja Pegawai (X) terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak (Y) yaitu 48,6 % dan sisanya 51,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti. Nafilah (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar sudah cukup baik atau efektif. Namun hendaknya intensifikasi tersebut dapat ditingkatkan agar tujuan dari organisasi yaitu meningkatkan penerimaan pajak dapat terpenuhi. Selain itu faktor lain yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu untuk mengukur intensifikasi pemungutan pajak Bumi dan Bangunan yaitu dengan melihat tingkat kepatuhan wajib pajak yang diukur melalui aspek Psikologis dan aspek yuridis. Aspek Psikologis terdiri dari Penyuluhan, Pelayanan dan Pemeriksaan. Sedangkan Aspek yuridis terdiri dari pendaftaran WP, pelaporan SPT, penghitungan pajak dan pembayaran pajak.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Penelitian tentang pengaruh Kinerja pegawai terhadap peningkatan pendapatan pajak di dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten jenepono, maka peneliti menarik kesimpulan yang berdasarkan paparan dan bahasan pada bab sebelumnya, yaitu :

1. Kinerja pegawai memiliki pengaruh positif dengan signifikan terhadap peningkatan pendapatan pajak di dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten jenepono dengan nilai probabilitas sign : 0,001 yang berarti $p \text{ value} : 0,05 = (0,001 < 0,05)$. Yang dijelaskan melalui persamaan menggunakan rumus regresi linear yaitu $Y = 5,713 + 0,832X$. Pengaruh positif tersebut memberikan makna bahwa semakin baik kinerja pegawai, maka peningkatan pendapatan pajak akan semakin tinggi.
2. Terdapat korelasi mengenai pengaruh Kinerja pegawai terhadap peningkatan pendapatan pajak di dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten jenepono dengan arah positif sebesar 0,697 atau dengan persamaan 69,7 persen.
3. Pengaruh Kinerja pegawai terhadap peningkatan pendapatan pajak di dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten Jeneponto sebesar 48,6 persen. Sisanya di pengaruh oleh faktor-faktor yang lain.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ini, maka direkomendasikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kinerja pegawai perlu ditingkatkan pelaksanaannya karena secara empiris terbukti berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan pajak. Upaya perbaikan ini perlu mengarah pada aspek-aspek yang masih dinilai kurang dalam peningkatan pendapatan pajak. Oleh karena itu untuk mengakomodasi kekurangan ini, pihak dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten jeneponto perlu lebih mengoptimalkan kualitas, kuantitas, dan ketetapan waktu para pegawainya guna menunjang peningkatan pendapatan pajak.
2. Perlunya keterbukaan informasi (transparansi data hasil pendapatan pajak), agar semua pegawai maupun wajib pajak (masyarakat) dapat mengetahui tingkat pendapatan pajak pertahunnya, sehingga mengurangi adanya indikasi praktik-praktik yang tidak diinginkan.
3. Pegawai di dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten jeneponto yang mempunyai kinerja yang baik diberikan *reward* , agar pegawai lainnya dapat termotivasi untuk memberikan kinerja yang prima agar tujuan instansi dapat tercapai secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Colquitt, 2011, *Orgazation Behavior*. Singapore: McGraw-Hill
- DISPENDA KAB. JENEPONTO, 2016, *Upaya peningkatan pendapatan daerah*, [www.http://.jenepontokab.go.id](http://www.jenepontokab.go.id)
- Dwiyanto, 2006, *Studi Tentang Administrasi*, Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Ghozali, Imam, 2001, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Edisi Kedua, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. (<http://setabasri01.blogspot.co.id/2008/04/uji-validitas-dan-reliabilitas-item.html>). Di akses 24 November 2016
- Ismail, Tjip, 2005, *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*, Jakarta: Departemen Keuangan-Badan Pengkajian Ekonomi Keuangan dan Kerja sama Internasional-Pusat Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah.
- Ivancevich, John M, 2012, *Human Resource Management*. Singapore: McGraw Hill International, Inc.
- Kasmir, 2016, *Manajemen Sumber Daya Manusia (TEORI DAN PRAKTIK)*, Penerbit : PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Kustiawan, Memen. 2005. *Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Melalui Peningkatan Kualitas Aparatur pemerintah Daerah*. *Jurnal Ilmu Administrasi*. Vol.2 No.1.
- Mahsun, Muhammad, 2013, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: BPFY- Yogyakarta.
- Mangkunegara, 2000, *Manajemen Sumber Daya Perusahaan*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Mardiasmo, 1992, *Perpajakan, Edisi 2*, Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan, Edisi 3*, Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- Nafilah, (skripsi;2014), *Intensifikasi Pemungutan pajak bumi dan bangunan di dinas pendapatan kota makassar*
- Rosdiana dan Irianto, 2014, *Pengantar Ilmu Pajak (kebijakan dan implementasi di indonesia,). buku edisi ke-3*: Fajar Interpretama Offset. penerbit PT Raja Grafindo Persada. jakarta.

- R. Santoso Brotodihardjo, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Edisi Ketiga, (Bandung: PT Eresco).
- Rachmat Achyar, 2006, *Optimalisasi Pajak Daerah dalam Era Globalisasi dan Otonomi daerah Guna Mewujudkan Good Governance: Tinjauan pada Provinsi DKI Jakarta*. Depok: HPMS D3 Pajak.
- Robbins, Stephen P, Mary Coulter, 2015, *Management*. Singapore: Prentice Hall International, Inc.
- Rochmat Soemitro, 2012, *Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan*, Bandung: Graha ilmu.
- Samsul Alam, (Skripsi:2010), *Kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pinrang*.
- Sitorus, 2008, *Analisis dampak krisis ekonomi terhadap penerimaan pajak penghasilan badan*, Tesis program Pasca Sarjana Magister manajemen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Soemitro, Rochmat, 2008, *pajak dan pembangunan*, Bandung: Eresco.
- Sugiyono, 2007, *Teknik dan Ilmu Pengetahuan Statistik dan Penelitian*, Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Administrasi*, Cetakan ke-20, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan ke-19, Bandung: Alfabeta.
- Tjandinegara, 2010, *Pengaruh Faktor-faktor Disiplin Kerja terhadap Produktivitas Kerja Karyawan pada CV. Gajaco Utama di Makassar*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya Makassar.
- Waluyo, 2008, *perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba.
- Wibowo, 2012, *Manajemen Kinerja Edisi Ketiga*, Jakarta: PT Rajagrafindo.

Perundang-undangan, yaitu:

- Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut dengan UU KUP 2007).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Penagihan Seketika.

Direktur Jenderal Pajak (DJP) NO. SE-06/PJ.9/2001 Tentang Pelaksanaan Intensifikasi Pajak

LAMPIRAN SKRIPSI

1. Data Tabulasi

No	Nama	L/P	Nilai Skor Responden																	Jumlah	
			4	5	4	5	4	4	4	4	4	5	3	4	5	4	5	4	5		4
1	AH	L	4	5	4	5	4	4	4	4	5	3	4	5	4	5	4	5	4	5	78
2	RR	P	5	4	4	5	5	3	4	4	4	3	4	5	4	5	4	5	4	5	77
3	MR	L	5	4	4	4	5	4	5	4	5	3	4	5	4	4	4	5	4	4	77
4	SS	P	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	76
5	ARB	L	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	69
6	T	L	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	5	4	5	5	5	4	5	81
7	AT	L	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	66
8	MAM	L	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	4	62
9	RR	L	3	3	4	5	5	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	64
10	NRS	P	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	69
11	D	L	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	69
12	FM	L	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	67
13	H	L	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	64
14	MH	L	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	65
15	H	L	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	65
16	FH	L	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	68
17	IN	L	4	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5	2	4	5	5	2	4	5	78
18	AB	L	4	5	4	4	3	5	4	4	4	5	4	4	3	4	4	4	3	4	72
19	AR	L	4	5	4	4	5	5	4	5	5	4	5	3	5	5	5	3	5	5	81
20	LH	L	4	5	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	71
21	SY	L	4	4	5	5	4	4	5	4	4	5	5	3	5	4	5	3	5	4	78
22	S	L	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	63
23	LHY	P	4	3	4	3	3	4	5	5	4	4	4	5	4	3	4	5	4	3	71
24	SB	L	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	66
25	H	P	4	4	5	4	5	4	5	5	4	4	5	3	4	5	5	3	4	5	78
26	S	P	4	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5	2	4	5	5	2	4	5	78
27	S	L	4	3	5	3	4	4	3	5	4	3	5	4	5	4	5	4	5	4	74
28	MB	L	2	5	4	4	5	4	3	4	5	5	5	1	5	5	5	1	5	5	73
29	S	L	1	4	3	5	4	3	3	4	5	5	5	2	5	5	5	2	5	5	71
30	MO	L	4	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4	3	4	5	4	3	4	5	75
31	ST	P	4	3	3	4	5	5	4	3	5	5	4	3	5	5	4	3	5	5	75
32	K	P	4	3	5	5	4	4	4	5	4	5	4	4	3	5	4	4	3	5	75
33	B	L	4	4	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	2	2	3	3	2	2	50
34	Z	L	4	5	3	4	5	4	5	3	4	3	4	5	3	4	4	5	3	4	72
35	H	P	4	5	2	4	5	2	3	5	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	64
36	R	L	4	1	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	84
37	MRF	L	4	5	4	5	4	4	4	4	5	3	4	5	4	5	4	5	4	5	78
38	NS	L	5	4	4	5	5	3	4	4	4	3	4	5	4	5	4	5	4	5	77
39	DM	P	5	4	4	4	5	4	5	4	5	3	4	5	4	4	4	5	4	4	77
40	SR	P	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	76
41	ABS	P	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	69
42	NAN	L	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	5	4	5	5	5	4	5	81
43	HS	L	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	66
44	IT	L	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	4	62
45	B	L	3	3	4	5	5	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	64
46	S	L	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	69
47	S	L	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	65
48	MAN	L	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	67
49	MI	L	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	64
50	H	L	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	65
51	B	L	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	65
52	K	L	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	68
53	BY	L	4	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5	2	4	5	5	2	4	5	78

2. Uji Validitas Kinerja Pegawai (X)

No.Instrumen	r Hitung	r Tabel	Keputusan
1	0,328	0,228	Valid
2	0,310	0,228	Valid
3	0,598	0,228	Valid
4	0,515	0,228	Valid
5	0,573	0,228	Valid
6	0,630	0,228	Valid
7	0,610	0,228	Valid
8	0,624	0,228	Valid
9	0,633	0,228	Valid

3. Uji Validitas Peningkatan Pendapatan Pajak (Y)

No.Instrumen	r Hitung	r Tabel	Keputusan
1	0,793	0,228	Valid
2	0,563	0,228	Valid
3	0,667	0,228	Valid
4	0,505	0,228	Valid
5	0,491	0,228	Valid
6	0,774	0,228	Valid
7	0,319	0,228	Valid
8	0,699	0,228	Valid
9	0,690	0,228	Valid

4. Uji Realibilitas Kinerja Pegawai (X)

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,669	,665	9

5. Uji Realibilitas Peningkatan Pendapatan Pajak (Y)

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,746	,788	9

6. Hasil Indeks Indikator Kinerja Pegawai (X)

NO	Indikator	Rata-rata Skor	Kategori
1	Kualitas	68,17%	Baik
2	Kuantitas	79,74%	Baik
3	Ketetapan Waktu	79,49%	Baik

7. Hasil Indeks Indikator Peningkatan Pendapatan Pajak (Y)

NO	Indikator	Rata-rata Skor	Kategori
1	Optimalisasi objek pajak	76,47%	Baik
2	Optimalisasi pemungutan pajak	80,37%	Sangat Baik
3	Optimalisasi penerimaan dari wajib pajak yang terdaftar	78,73%	Baik

8. Hasil Uji Regresi Sederhana

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,697 ^a	,486	,476	2,82492

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Gamiswar Putra Oktavianto dilahirkan di Makassar pada tanggal 15 juni 1994. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Segani Galib dan Ibu Rosmiati. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Inpres No. 163 Jenetalasa Desa Camba-Camba Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto pada tahun 2006, Pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 3 batang kabupaten jeneponto pada tahun 2009, Pendidikan Menengah Atas di SMA Negeri 1 Batang pada tahun 2012, dan pada tahun 2013 penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis juga aktif di dunia pergerakan dan organisasi baik internal maupun eksternal kampus, seperti di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan organisasi eksternal seperti Jaringan Aktivis Indonesia (JAKSA), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Pengaruh Kinerja Pegawai Terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto